

RENSTRA 2019-2023



RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023



DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG

Jl. Desa Parahu-Sukamulya, Kabupaten Tangerang
Telp/Fax. 021 - 29508253

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 disusun sebagai wujud penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023 Kabupaten Tangerang. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hal ini dalam rangka mencapai keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan melalui regulasi, forum koordinasi dan musyawarah rencana pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Tangerang dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain; efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Sukamulya,

2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN TANGERANG



Dr. H. BAMBANG MARDISENTOSA, Drs,

NIP. 196106261986031018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	
Landasan Hukum	
Maksud dan Tujuan	
Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG.....	4
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
Sumber Daya Perangkat Daerah	
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	39
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
Telaahan Renstra Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
Penentuan Isu-Isu Strategis	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN.....	61
Visi dan Misi	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	65
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	93
BAB VIII PENUTUP	95
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Peraturan Bupati Tangerang tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tangerang.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2019-2023. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 diharapkan menjadi jawaban konkrit dengan tujuan meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan yang merupakan tuntutan masyarakat Kabupaten Tangerang. Dengan melakukan perbuatan nyata yang luar biasa secara sistematis dan bertahap pada seluruh Program/Kegiatan yang telah ditetapkan, yang dirumuskan secara kolektif oleh pimpinan bersama tim kerja untuk dikomunikasikan kepada seluruh komponen organisasi dan diimplementasikan guna mendukung terciptanya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tangerang.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rensta Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
18. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana, Teknis Parkir, dan Terminal, Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang;
19. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok, dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor, Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang untuk kurun waktu Tahun 2019 – 2023 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Tangerang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang untuk kurun waktu tahun 2019-2023 dalam pelaksanaan tugas dan

funksinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang.

- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang tahunan dalam kurun waktu tahun 2019-2023

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian /Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANGERANG

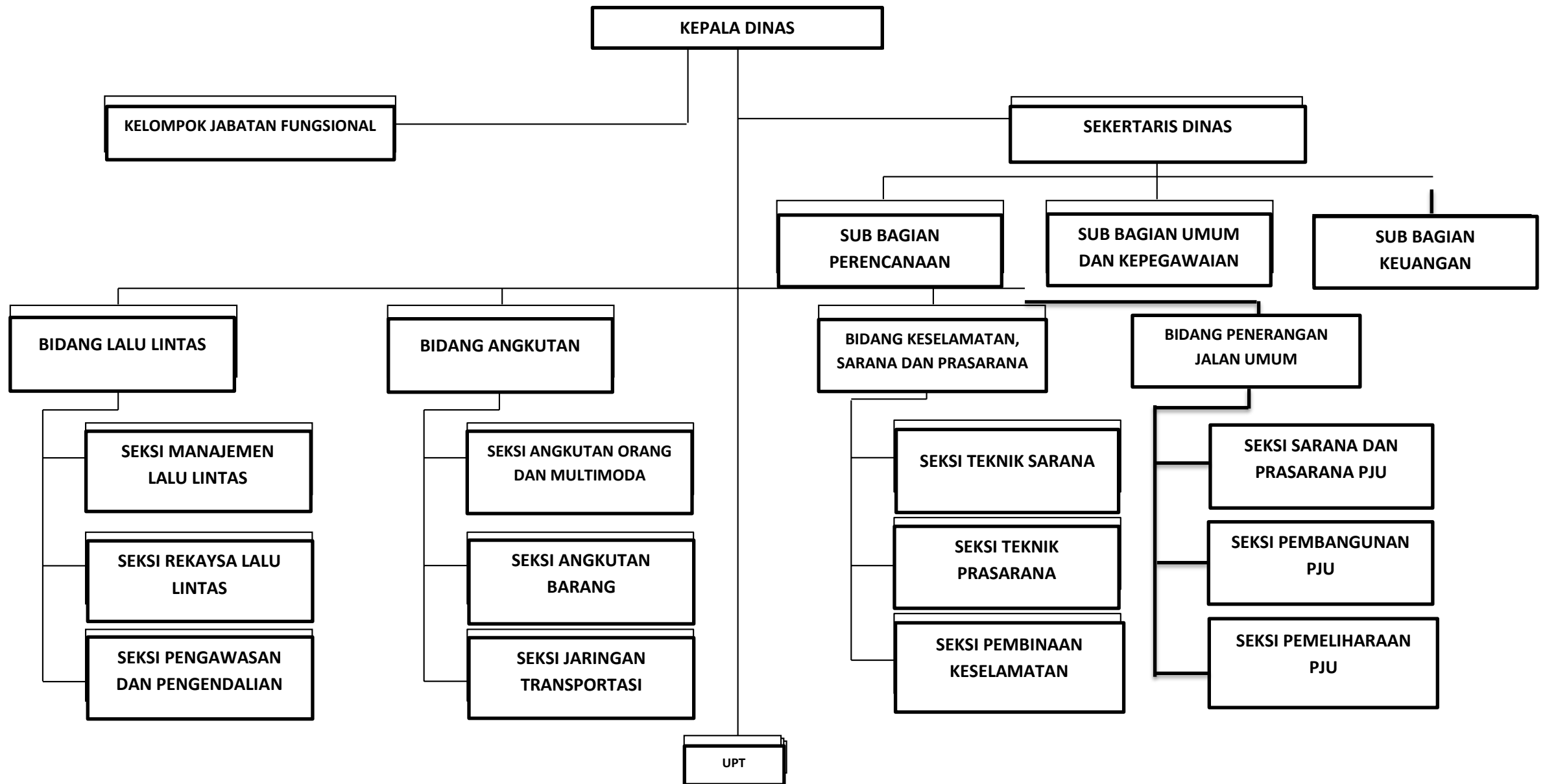
2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang

Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, maka dengan ini Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan rincian tugas dan tata kerja, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- d. Bidang Angkutan, membawahkan :
 - 1. Seksi Angkutan dan Multimoda;
 - 2. Seksi Angkutan Barang.
 - 3. Seksi Jaringan Transportasi;
- e. Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Seksi Teknik Sarana
 - 2. Seksi Teknik Prasarana
 - 3. Seksi Pembinaan Keselamatan
- f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum;
- g. Unit pelaksana teknis ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.1.2 Uraian Tugas

Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok *"Membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah"*

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis bidang Perhubungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya tugas pokok dan rincin tugas dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di atas diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 93 Tahun 2016 Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, sebagai berikut

1) Kepala Dinas

Tugas pokok : Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Rincian Tugas Kepala Dinas :

- a. Merumuskan program kerja tahunan Dinas Perhubungan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dinas;
- b. Merumuskan bahan Kebijakan Teknis dan Pedoman Kerja Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki serta peraturan yang berlaku agar tercipta regulasi yang efektif dan efisien terhadap pelayanan masyarakat;
- c. Menganalisis dokumen-dokumen atau naskah dinas yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Perhubungan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja sesuai rencana;
- e. Membina pelaksanaan teknis Dinas Perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan, Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana Keselamatan, Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU),;

- f. Membina pegawai dilingkungan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- g. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas, dan tanggung jawab masing-masing agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan sesuai dengan rumusan yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- i. Melaksanakan sosialisasi pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan bidang perhubungan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar terdapat kesamaan persepsi dan komitmen;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dengan cara membandingkan antara Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
- k. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan instruksi yang telah diberikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.

2) Sekretariat

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Perencanaan, Umum dan Kepegawaian serta Keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris Dinas mempunyai *fungsi* sebagai berikut

- a. Penyiapan rumusan kebijakan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Penyiapan rencana dan program kerja sekretariat mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penyiapan pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyiapan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya dilingkup kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk meningkatkan kinerja pegawai;
- e. penyiapan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- f. Pengelolaan administrasi dinas yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;

- g. Pelaksanaan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- h. Penyiapan dan Pelaksanaan pengembangan e-governance.

Rincian tugas Sekretariat :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- b. Membagi tugas dan program yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- c. Memberi petunjuk program yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Mengatur program kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- e. Melaksanakan penyusunan usulan anggaran program kegiatan dinas berdasarkan rencana kerja dinas sebagai pedoman dalam penganggaran agar terhindar dari kesalahan;
- f. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi : surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan dan inventarisasi barang, pemeliharaan serta penyediaan barang kebutuhan perlengkapan sarana prasarana dan aset dinas berdasarkan tugas dan fungsi dinas agar dapat dipertanggungjawabkan dan tepat pada waktunya;
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penata usahaan keuangan sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas agar dapat dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya;
- h. Mengevaluasi kegiatan program bidang kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan instruksi yang telah diberikan untuk pedoman pelaksanaan tugas agar berjalan dengan lancar.

2.1) Sub Bagian Perencanaan

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan perencanaan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Perencanaan dinas;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan

- Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Menyusun usulan, perbaikan dan perubahan anggaran kegiatan dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan sub bagian perencanaan;
 - f. Merencanakan dan melaksanakan pengembangan e-governance;
 - g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan yang meliputi :Monitoring dan Evaluasi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Fasilitas Perencanaan, e-Reporting, Riviui Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Umum meliputi: surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas, pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
- c. Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi: Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun;
- d. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi aset dan persediaan, pengadaan, pendistribusian, perjalanan dinas , pemeliharaan barang-barang inventarisasi dinas dan Stock Opname;
- e. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Kepegawaian meliputi : Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Tertentu, Kenaikan Gaji Berkala, Data Pegawai, DUPAK, PAK, SKP, DUK, Bezetting Pegawai, Kesejahteraan Pegawai, Pembinaan Disiplin Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Pensiun Pegawai;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- g. Melaksanakan fasilitas Pengelola Informasi dan Dokumen (PID);
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3) Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan keuangan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan keuangan dinas;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS- Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Cash Opname serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;membagi tugas pelaksanaan kegiatan Subbag Keuangan meliputi : Pembukuan, Pencairan, Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS-Bendaharawan, LS-Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, serta Pelaporan Pertanggung jawaban Anggaran;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan;
- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan meliputi : Neraca, Laporan Realisasi (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan catatan atas laporan keuangan (CALK) dan cash opname;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Lalu Lintas

Tugas pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas.Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang lalu Lintas;
- b. Penyiapan rencana dan program kegiatan Bidang Lalu Lintas yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Penyiapan Pengendaliandan pengawasan Bidang Lalu Lintas meliputi Manajemen Lalu Lintas, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengawasan dan Pengendalian;
- d. Penyiapan Bimbingan teknis pelaksanaan program kegiatan Bidang Lalu Lintas;
- e. Pengelolaan administrasi Bidang Lalu Lintas.

Rincian tugas Bidang Lalu Lintas :

- a. Merumuskan program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- b. Membagi tugas program bidangmanajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- c. Memberi petunjuk program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
- d. Mengatur program bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;

- e. Melaksanakan kegiatan bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
 - f. Mengevaluasi kegiatan program dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

3.1) Seksi Manajemen Lalu Lintas

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan manajemen lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Manajemen Lalu Lintas;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan manajemen Lalu Lintas;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan manajemen Lalu lintas;
- d. Melaksanakan kegiatan teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parkir;
- e. Melakukan kegiatan penganalisisan dampak lalu lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun pedoman/petunjuk teknis Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Manajemen Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Manajemen Lalu Lintas berupa, teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parkir, penganalisisan dampak lalu lintas;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, teknik manajemen perparkiran, penetapan disain geometrik, dan penentuan titik parkir serta penganalisisan dampak lalu lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas

Tugas pokok : Melakukan penyusunan kegiatan rekayasa lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas;

- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Melaksanakan kegiatan rekayasa lalu lintas meliputi : perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp;
- e. Menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan Standar Operasional Pelayanan (SOP) Rekayasa Lalu Lintas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas berupa perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan rekayasa lalu lintas berupa perencanaan, penyediaan, pengadaan, penetapan, pemasangan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan fasilitas perlengkapan jalan, pemasangan rambu-rambu, marka Rambu Pendahuluan Penunjuk Jurusan (RPPJ), Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan sarana lain yang terkait dengan kegiatan rekayasa lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku seperti penggunaan traffic cone, road barrier/water, paku jalan, steak lamp; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.

3.3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyusun pedoman petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian berupa pengaturan dan penjagaan lalu lintas, pengawasan kelebihan muatan barang, pengawasan operasional angkutan penumpang dan barang, pengawasan persyaratan teknis dan laik jalan, penertiban pelanggaran ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum di jalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan Pengendalian;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4). Bidang Angkutan

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian angkutan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Angkutan mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan;
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Angkutan;
- c. Penyiapan Pengendalian dan pengawasan Bidang Angkutan;
- d. Penyiapan Bimbingan teknis Pelaksanaan Program Bidang Angkutan;
- e. Pengelolaan Administrasi Bidang Angkutan.

Rincian tugas Bidang Angkutan :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- b. Membagi tugas program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- c. Memberi petunjuk program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;
- d. Mengatur program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transpotasi;

- e. Mengevaluasi kegiatan program bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transportasi;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang Angkutan Orang dan Multimoda, Angkutan Barang serta Jaringan Transportasi;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Angkutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Angkutan dan Multimoda;
 - 2. Seksi Angkutan Barang;
 - 3. Seksi Jaringan Transportasi;

4.1) Seksi Angkutan dan Multimoda;

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan angkutan orang dan multimoda. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Angkutan Orang dan Multimoda mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Angkutan dan Multi moda rencana;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- d. Melaksanakan kegiatan meliputi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- e. Menyusun rencana kebutuhan angkutan orang dan multi moda;
- f. Memproses trayek angkutan orang dan multi moda;
- g. Menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Atau Pas kecil kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage) menerbitkan surat keselamatan kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage);
- h. Menerbitkan kartu ijin usaha angkutan orang dan multi moda;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Angkutan Orang dan Multi Moda;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan dan Multi Moda; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2) Seksi Angkutan Barang.

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan angkutan barang. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Angkutan Barang mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Angkutan Barang;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;

- d. Melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Angkutan Barang;
- e. Melaksanakan kegiatan dinas meliputi pelayanan penyusunan rencana kebutuhan angkutan barang;
- f. Memberi rekomendasi izin angkutan barang, pengawasan izin plat kuning, mutasi daerah dan surat rekomendasi izin perusahaan angkutan barang umum sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Angkutan Barang;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan angkutan barang; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3) Seksi Jaringan Transportasi

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan jaringan transportasi. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Jaringan Transportasi mempunyai *rincian tugas* sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan Jaringan Transpotasi;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Jaringan Transpotasi;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Jaringan transpotasi;
- d. Melaksanakan kegiatan penyusunan jaringan pelayanan transportasi dan jaringan trayek;
- e. Merencanakan kebutuhan kendaraan untuk angkutan
- f. Melaksanakan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten;
- g. Melaksanakan rencana umum pengembangan Transit Oriented Development (TOD) sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Menyusun pedoman petunjuk teknis, Standar Operational Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Jaringan Transpotasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Jaringan Transpotasi;
- j. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Jaringan Transpotasi; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian keselamatan, sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- c. Penyiapan Pengendalian kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
- d. Penyiapan Bimbingan kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;

- e. Pengelolaan administrasi kegiatan Bidang Keselamatan, Sarana dan prasarana.

Rincian tugas Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana :

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang meliputi : teknik sarana,teknik prasarana daan pembinaan keselamatan;
 - b. Membagi tugasprogram meliputi : teknik sarana,teknik prasarana dan pembinaan keselamatan;
 - c. Memberi petunjuk program bidang meliputi : teknik sarana,teknik prasarana daan pembinaan keselamatan;
 - d. Mengatur program bidang meliputi : teknik sarana,teknik prasarana daan pembinaan keselamatan;
 - e. Mengevaluasi kegiatan program bidang meliputi : teknik sarana,teknik prasarana dan pembinaan keselamatan;dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Keselamatan Sarana dan Prasarana, membawahkan :
- 1. Seksi Teknik Sarana
 - 2. Seksi Teknik Prasarana
 - 3. Seksi Pembinaan Keselamatan

5.1) Seksi Teknik Sarana

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan teknik sarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Teknik Sarana mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan teknik sarana;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- d. Melaksanakan kegiatan Seksi Teknik Sarana meliputi: penyediaan , pengadaan, dan penetapan sarana dan prasarana/fasilitaskeselamatan jalan, Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Rute Aman Sekolah (RASS),alat pengujian kendaraan bermotor, alat timbang angkutan barang (tonase), fasilitas ramp check, alat penguji emisi gas buang kapal di bawah 7 GT (Gross Tonage), alat/sarana pengendali dan pengaman pemakai jalan seperti (guadrill, speed traps, rmbler strips, delineator, sparator);
- e. Menyusun petunjuk teknis kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Tehnik Sarana;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana;
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Teknik Sarana; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.2) Seksi Teknik Prasarana

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Teknik Prasarana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Teknik Prasarana mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Teknik Prasarana;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasarana;
- c. Membagi tugas pelaksanaan seksi Teknik Prasarana;
- d. Melaksanakan kegiatan seksi pengembangan Terminal Type C, pelabuhan penyeberangan, helipad, terminal/stasiun terpadu antar moda, galangan kapal/docking untuk kapal di bawah 7 GT;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasarana;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi Teknik Prasarana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk akuntabilitas kinerja dan rencana kerja yang akan datang;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5.3) Seksi Pembinaan Keselamatan

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan Pembinaan Keselamatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembinaan Keselamatan mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pembinaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pembinaan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan kabupaten;
- d. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan perlintasan kereta api pada jalan Kabupaten;
- e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan /lomba pelajar keselamatan, pemilihan Abdi Yasa teladan/Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT);
- f. Memberikan rekomendasi sekolah mengemudi/kursus mengemudi, dan kegiatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan lalu lintas jalan, pelabuhan, penyeberangan, dan perlintasan kereta api pada jalan Kabupaten serta penentuan atau penetapan fasilitas keselamatan jalan sesuai peraturan yang berlaku;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keselamatan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Keselamatan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)

Tugas Pokok : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian Penerangan Jalan Umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) mempunyai *fungsi* sebagai berikut :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- b. Penyiapan rencana dan program Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- c. Penyiapan Pengendalian kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum;
- d. Penyiapan Bimbingan pengendalian kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU);
- e. Pengelolaan administrasi kegiatan Bidang Penerangan Jalan Umum.

Rincian tugas Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU):

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang sarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
 - b. Membagi tugas program bidang sarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
 - c. Memberi petunjuk program bidansarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
 - d. Mengatur program bidansarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU;
 - e. Mengevaluasi kegiatan program bidansarana dan prasarana PJU, Pembangunan PJU dan Pemeliharaan PJU dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan di bidang kepada Kepala Dinas;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahkan :
1. Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;
 2. Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Umum;

6.1) Seksi Pembangunan Penerangan Jalan Umum;

Tugas Pokok : melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan kegiatan Pembangunan PJU. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pembangunan PJU mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan Pembangunan PJU;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pembangunan PJU;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan PJU;
- d. Melaksanakan kegiatan Pembangunan PJU meliputi pemasangan PJU, pendataan, menghitung kebutuhan titik lampu, verifikasi tagihan rekening listrik, dan koordinasi dengan lembaga/instansi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran tugas agar berjalan dengan lancar;

- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Pembangunan PJU;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan PJU; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.2) Seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan kegiatan Pemeliharaan PJU. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Pemeliharaan PJU mempunyai rincian tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- d. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan /rehabilitasi lampu jalan umum atau sarana lain terkait lampu penerangan jalan umum;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum;
- f. Membuat laporan pelaksanaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

6.3) Seksi Sarana dan Prasarana PJU

Tugas Pokok : Melakukan penyusunan kegiatan Penyusunan kegiatan Sarana dan Prasarana PJU. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PJU mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Penerangan jalan Umum;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana PJU;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana, Prasarana PJU;
- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan dan menyediakan serta operasional sarana dan prasarana penerangan jalan umum;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dilingkungan Seksi Sarana, Prasarana PJU;
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi sarana dan Prasarana PJU; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Unit pelaksana teknis pada Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. UPT Perparkiran dan Terminal yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 127 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Parkir Dan Terminal.

- b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 128 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Setiap organisasi tidak terlepas dari unsur manusia sebagai pelaksananya. Pentingnya arti sumber daya manusia adalah mengingat pada bidang tugas yang akan dilaksanakannya. Prinsip the right man on the right job sangat diperlukan untuk menciptakan kehandalan dan profesionalisme pegawai. Kualitas sumber daya manusia terkait erat dengan tingkat pendidikan baik formal maupun non formal. Pendidikan formal ditempuh melalui pendidikan sekolah-sekolah, sedangkan non formal ditempuh melalui pendidikan penjenjangan dan kursus-kursus / diklat teknis bidang Perhubungan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 64 PNS, dengan rincian seperti pada tabel berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S-3	1	-	1
2	S-2	9	1	10
3	S-1/D.IV	21	2	23
4	DIII/Akademi	2	-	2
5	DII	1	-	1
6	DI	-	-	
7	SLTA dan lebih rendah	27	-	27
Jumlah		61	3	64

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No	Status Pegawai	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	PNS	61	3	64
2	Tenaga Kerja Kontrak	1	-	1
3	Tenaga Kerja Sukarela	268	36	304
Jumlah		330	39	369

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan

No	Golongan	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Golongan IV	8	-	8
2	Golongan III	31	3	34
3	Golongan II	22	-	22
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		61	-	64

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	19	-	19
Jumlah		25	-	25

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	PKB Penyelia	-	-	-
2	PKB Pelaksana Lanjutan	5	-	5
3	PKB Pelaksana	-	-	-
Jumlah		5	-	5

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupan Tangerang Tahun 2018, diolah

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal

No	Jenis Pendidikan	L	P	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Diklat PIM II	1	-	1
2	Diklat PIM III	5	-	5
3	Diklat PIM IV	23	-	23
4	Diklat Teknis Perhubungan	5	-	5
5	Diklat PPNS	3	-	3
Jumlah		37		37

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan adalah sebagaimana Tabel 2.7

Tabel 2.7

Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2016 s/d 2018

NO.	Nama Barang	2013			2014			2015			2016			2017			2018			JUMLAH
		Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	
			Baik			Baik			Baik			Baik			Baik			Baik		
1	Gedung Kantor																1			1
2	Balai PKB																1			1
3	Kendaraan roda 4	3			4			2									1			10
4	Kendaraan roda 2							3												3
5	Filling Besi/Metal	10						10												20
6	Brankas	1																		1
7	Mesin absen	1												1			1			3
8	Zice	5																		5
9	Meja Rapat	20																		20
10	Meja Tamu Ruangan Biasa																2			2
11	Meja Kayu/rotan																5			5
12	Kursi Tamu																8			8
13	Kursi Putar	15			6															21
14	Meja Biro	12																		12
15	Pc Unit	2			6						11			5			2			26
16	Laptop																8			8
17	Note Book	2	1	1	10			5			5									22
18	Hardisk	2			2									3			2			9

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018, diolah

Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2016 s/d 2018

NO.	Nama Barang	2013			2014			2015			2016			2017			2018			JUMLAH
		Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	
			Baik			Baik			Baik			Baik			Baik			Baik		
19	Peralatan Komputer Mainframe Lain Lain	1																		1
20	Printer	4			5			7			4			9			4			33
21	Camera + attachment	2																		2
22	Sofa	1									2						1			4
23	Mesin Ketik Elektrik				2			2												4
24	Lemari Es																1			1
25	Lemari sorok				20															20
26	Ala Penghancu r Kertas				5															5
27	White Board				1															1
28	AC Unit																6			6
29	AC split				3									3						6
30	Unintemupt ible Power Suply (UPS)				2															2
31																				
32	alat komunikasi radio VHF lain lain				1															1
33	Program input equipment lain lain				1															1
34	Mesin ketik manual portable (11-13)							5												5
35	Tenda							16												16

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018, diolah

Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2016 s/d 2018

NO.	Nama Barang	2013			2014			2015			2016			2017			2018			JUMLAH
		Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	Jumlah	Kondisi	Rusak	
			Baik			Baik			Baik			Baik			Baik			Baik		
36	Televisi							1			5			5						11
37	Dispenser							4						3						7
38	Alat rumah tangga lain lain							1			5									6
39	Brake Band Tester	1																		1
40	Tube Tester													1			2			3
41	Head Light Tester							1												1
42	Diesel smoke tester							1												1
43	Aalat ukur lainnya																2			2
44	Lemari Besi										1									1
45	Lemari Penyimpanan										3						1			4
46	Mesin Kontrol/jaga										1									1
47	Video camera & recorder										4									4
48	Handy Cam										1									1
49	Papan Visuil										10									10
50	Meja Kerja Pegawai non Struktural										4									4

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018, diolah

Kondisi Asset Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2016 s/d 2018

NO.	Nama Barang	2013			2014			2015			2016			2017			2018			JUMLAH
		Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	Jumlah	Kondisi Baik	Rusak	
51	Meja Kerja Pejabat Eselon III										1									1
52	Lemari dan arsip pejabat													5						5
53	Kursi Rapat																30			30
54	Kursi Besi/metal													3						3
55	Internet													1						1
56	Meja Reception													1			2			3
57	Genset (leb scale)													1						1
58	Rak rak Penyimpanan													1						1
59	Pesawat Telephone													1						1
60	Telephon Mobile													3						3
61	Mic conference													1						1
62	Rak Besi/Metal													1						1
63	Global Positioning System (GPS)																4			4
64	Personal komputer DLL																1			1
65	Tas Kulit																2			2
66	HT				30	22	8	5			21									56

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018, diolah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Urusan Wajib Perhubungan

Transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya dalam pembangunan. Panjang jalan dapat menunjukkan tingkat keterbukaan dan perkembangan masyarakat suatu wilayah, semakin panjang suatu jalan, maka tingkat keterbukaan dan perkembangannya semakin tinggi. Oleh karena itu, tersedianya fasilitas jalan sangat dibutuhkan dalam melayani kebutuhan masyarakat terutama menggerakkan lalu lintas perekonomian. Menurut statusnya jalan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu jalan nasional, jalan propinsi, dan jalan kabupaten.

Kinerja pelayanan kepada masyarakat dapat digambarkan dengan ketersediaan prasarana, sarana dan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan yang cukup memadai. Selanjutnya data-data prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menurut beberapa kriteria tertentu pada tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut :

a. Data Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tangerang

Tabel 2.7

DATA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN TANGERANG
BERDASARKAN JENIS KENDARAAN
TAHUN 2015 S/D 2017

NO	JENIS	TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		HITAM	MERAH	KUNING	HITAM	MERAH	KUNING	HITAM	MERAH	KUNING	HITAM	MERAH	KUNING
1	SEPEDA MOTOR												
a	R2	1.227.196	1.411	-	1.327.084	1.486	-	1.272.947	1.235	-	1.241.713	1.297	-
b	R3	10.953	281	-	12.475	316	-	13.166	361	-	13.096	340	-
2	SEDAN	10.869	14	601	11.552	14	325	11.399	13	213	11.120	17	178
3	JEEP	9.404	27	-	10.446	34	-	11.449	33	-	12.477	33	-
4	MINIBUS	102.083	822	4.537	116.117	903	4.494	128.310	887	4.234	138.745	985	3.859
5	BUS	22	8	137	22	8	152	15	8	184	24	7	217
6	MICROBUS	425	22	892	386	24	818	362	29	722	355	30	669
7	PICK UP	25.180	153	98	26.864	161	127	26.976	153	201	26.686	151	214
8	LIGHT TRUK	12.280	266	2.580	13.272	237	2.880	13.757	265	3.166	14.271	296	3.438
9	TRUCK	1.553	11	1.970	1.636	12	2.570	1.715	10	3.157	1.737	8	3.628
10	ALAT BERAT	-	-	-	-	-	0	3	-	-	3	-	-
	JUMLAH	1.399.965	3.015	10.815	1.519.854	3.195	11.366	1.480.099	2.994	11.877	1.460.227	3.164	12.203

Sumber : Samsat Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

b. Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tangerang

Tingginya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor namun perkembangan sarana dan prasarana jalan lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas, dampak pada meningkatnya kejadian kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu. Angka kecelakaan di wilayah kabupaten tangerang tahun 2015 sampai dengan 2018 sebagaimana disajikan pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas
Tahun 2015-2018

NO	Uraian	Satuan	Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas			
			2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Kecelakaan	Kejadian	1023	495	442	375
2	Kerugian Meteriil	Rupiah	1.125.750.000	1.204.920.000	1298.000.000	828.800.000
3	Jumlah Korban	Orang	1023	495	442	375
	- Meninggal	Orang	54	212	196	153
	- Luka Berat	Orang	708	385	204	79
	- Luka Ringan	Orang	261	187	204	359

Sumber : Dinas Perhubungan dan Polres Tangerang Tahun 2018, diolah

c. Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Tangerang

Posisi geografis Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat sangat strategis bagi perkembangan wilayah, dimana Kabupaten Tangerang manjadi alternatif bagi DKI Jakarta yang sudah padat, maka untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan posisi di jalan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018 sebagaimana disajikan pada tabel 2.9

Tabel 2.9
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan
Tahun 2018

NO	Uraian	Satuan	Jumlah Pada tahun					
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Rambu-Rambu Lalu Lintas a. Rambu Tiang F b. RPPJ c. Rambu Standar	Unit	0 0 0	0 0 0	15 16	12 6	10 1 139	195
2	Marka a. Zebra Cross b. Marka Lajur	M2	250 600	195 1.019	320 1.000	200 200	190 190	93,30 1.950
3	Speed Trap (Pita Penggaduh)	M2	250	580	306	199	200	299
4	Paku Jalan	Buah	0	0	664	623	644	0
5	Traffic Light (APILL)	Unit	0	0	1	0	0	
6	Warning Light	Unit	0	0		4	0	7
7	Guadril (Pagar Pengaman Jalan)	M2	772	130	0	480	0	
8	Halte	Unit	8	0	0	0	0	0
9	Penerangan Jalan Umum	Titik	163	896	931	1.300	163	250

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

d. Izin Trayek di Kabupaten Tangerang

Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif. Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan pribadi. Banyak alasan untuk memiliki kendaraan pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan.

Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan masalah diantaranya masalah kemacetan. Oleh karena itu semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum, semakin efektif pula penggunaan jalan raya. Dengan kata lain,

kendaraan umum merupakan salah satu pemecahan masalah kemacetan di jalan raya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang No.551.2/Kep.230-Huk/2012, tentang Penetapan Jaringan Trayek dan Jumlah Mobil Penumpang Umum Angkutan Perdesaan Kabupaten Tangerang. Menurut data yang ada, di Kabupaten Tangerang setidaknya ada 42 trayek angkutan umum dari berbagai jurusan. Seperti trayek angkutan umum jurusan Curug-Bitung-Balaraja PP, Legok-Pagedangan-Kelapadua PP, Serpong-Cisauk-Cicangkal PP, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya mengenai jaringan trayek dan jumlah kendaraan sebagaimana terlihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10
Rekapitulasi Data Angkutan Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2018

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah
A.	Mobil Barang :	
1	Truck	6.732
2	Pick Up	27.112
3	Light Truck	17.661
B.	Mobil Bis :	
4	Bis	266
5	Micro	554
6	Mini	2.379
C.	Mobil Penumpang:	
7	Taxi	147
8	Tempelan	202
	Total	55.053

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 2018, diolah

Tabel 2.11
Trayek Angkutan Perdesaan di Kabupaten Tangerang
Tahun 2018

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK / RUTE	WARNA KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN SESUAI KEP. BUPATI Nomor 551.2/Kep/230-Huk/2012	JUMLAH KENDARAAN YANG DAPAT IZIN DARI DINAS PERHUBUNGAN	KET.
1	A.07	CURUG - BITUNG - BALARAJA. PP	KUNING UNGU	100	100	
2	A.08	LEGOK - PAGEDANGAN - KELAPA DUA . PP	HIJAU	50	28	
3	A.09	BALARAJA - CIBADAK - TIGARAKSA - DARU. PP	BIRU HIJAU	50	50	
4	A.10	PERUM DASANA INDAH - LEGOK - CURUG. PP	KUNING BIRU TUA	50	4	TDK AKTIF

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK / RUTE	WARNA KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN SESUAI KEP. BUPATI Nomor 551.2/Kep/230-Huk/2012	JUMLAH KENDARAAN YANG DAPAT IZIN DARI DINAS PERHUBUNGAN	KET.
5	A.11	LEGOK - RANCA IYUH - PS.KORELET - SOLONG - DARU. PP		40	40	TDK AKTIF
6	D.20	SERPONG - CISAUK - CICANGKAL. PP	PUTIH ORANGE	140	130	
7	D.20A	LEGOK - PERT.ASEM - PERT.CISAUK - SERPONG. PP	UNGU HITAM	100	61	
8	E.01	BALARAJA - CIKANDE - GINTUNG.PP	PUTIH STRIP KUNING	150	150	
9	E.02	BALARAJA - KRONJO. PP	PUTIH STRIP KUNING	115	24	TDK AKTIF
10	E.03	BALARAJA - KRESEK. PP	HIJAU MUDA HIJAU TUA	150	150	
11	E.04	BALARAJA - CISOKA. PP	PUTIH STRIP KUNING	50	4	TDK AKTIF
12	E.05	BALARAJA - CIKUPA - PASAR KEMIS. PP	PUTIH STRIP KUNING	65	52	
13	E.06	BALARAJA - PERT.CANGKUDU - PS.CISOKA - TMN. ADYASA.PP	PUTIH HIJAU	200	195	
14	E.07	CIKUPA - CIBADAK - PS.TIGARAKSA - TENJO. PP		65		TDK AKTIF
15	E.09	KRONJO - RAJEG - PASAR KEMIS. PP	BIRU MUDA BIRU TUA	45	26	
16	E.10	CURUG-SERDANG ASRI-MEKAR ASRI-CITRA RAYA-TIGARAKSA.PP	KUNING HIJAU	100	87	
17	E.12	CIKUPA-CITRA RAYA-PANONGAN-SERDANG ASRI-MEKAR ASRI-PS.KORELET-BUGEL-KATOMAS-PS.GUDANG-TIGARAKSA.PP	HIJAU ORANGE	75	42	
18	E.15	BALARAJA - CISOKA - TIGARAKSA - KOMP.PEMDA - JEUNJING.PP	HIJAU HINO	50	21	
19	E.16	TERM.SENTIONG-RSUD BALARAJA-KAWASAN OLEK-PUSPEM TIGARAKSA.PP	HIJAU HINO	70	21	TDK AKTIF
20	F.03	TANJUNG PASIR - KP. MELAYU - DADAP. PP	PUTIH STRIP KUNING	115	106	
21	F.04	KP.MELAYU - CITUIS - SANGRILA. PP	BIRU KUNING	70	40	
22	F.05	KP.MELAYU - KALIBARU - KEDAUNG - SEPATAN. PP	UNGU KUNING	50	50	
23	F.06	KP.MELAYU - KP.BESAR - DS.LEMO - KP.MUARA.PP	PUTIH HIJAU	50	10	
24	F.07	SEPATAN - PASAR PAKUHAJI - JL.H.UNUB - KP.MELAYU.PP	HIJAU STRIP KUNING	150	1	TDK AKTIF
25	G.05	TANJUNG KAIT - MAUK - PASAR KEMIS. PP	BIRU MUDA BIRU TUA	42	42	
26	G.07	KOTABUMI - BITUNG - CIKUPA - BALARAJA. PP	BIRU MUDA BIRU TUA	155	155	

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK / RUTE	WARNA KENDARAAN	JUMLAH KENDARAAN SESUAI KEP. BUPATI Nomor 551.2/Kep/230-Huk/2012	JUMLAH KENDARAAN YANG DAPAT IZIN DARI DINAS PERHUBUNGAN	KET.
27	G.08	DAON - CADAS - SEPATAN. PP	BIRU MUDA BIRU TUA	25	10	TDK AKTIF
28	G.09	KOTABUMI-JL.PAJAJARAN-DS.DUMPIT-PRM.HARKIT-LIPPO KARAWACI. PP	BIRU KUNING	60	17	
29	G.15	PS.KEMIS-TMN.SUKAMANTRI-RAJEG-PS.SEPATAN. PP	BIRU MUDA BIRU TUA	50	11	
30	G.16	PS.SEPATAN-KP.PISANGAN-JATIMULYA-LEBAK WANGI-CADAS-NAGRAK.PP	PUTIH HIJAU	50	5	
31	G.17	CURUG-SK.BAKTI-BOJONG NANGKA-SUMARECON MALL SERPONG. PP	PUTIH HIJAU	150	25	
32	R.07	CIMONE-PALASARI-BINONG-CURUG.PP	PUTIH STRIP BIRU	150	150	
33	R.07A	CIMONE-KAV.PEMDA-CURUG.PP	PUTIH STRIP BIRU	110	110	
JUMLAH				2892	1917	

Sumber: Dinas Perhubungan, Kab. Tangerang Tahun 2018, diolah

Tabel 2.12
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Tahun 2018

NO	Moda	Satuan	Jumlah Pada Tahun
			2018
1	Penumpang AKDP	Org/Thn	-
2	Penumpang AKAP	Org/Thn	-
3	Penumpang Angkutan Pedesaan	Org/Thn	55.612.860
Jumlah		Org/Thn	55.612.860

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah

e. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB/KIR)

Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR di Kabupaten Tangerang hanya 1 unit yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu yang berlokasi di Kecamatan Balaraja. Selama tahun 2013 sampai dengan 2017 telah dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB sebanyak 244.447 unit kendaraan dengan rincian mobil barang sebanyak 217.890 unit, mobil bis sekitar 22.646 unit, mobil penumpang sebanyak 3.574 unit kendaraan, dan tempelan sebanyak 337 unit.

Selama tahun 2013 telah di uji berbagai kendaraan di UPT PKB sebanyak 45.244 unit kendaraan, pada tahun 2014 sebanyak 44.815, sedangkan tahun 2015 telah di uji sebanyak 51.735, dan tahun 2016 telah dilakukan uji KIR sebanyak 51.192 unit kendaraan, dan pada tahun 2017 telah dilakukan pengujian terhadap kendaraan sebanyak 51.461 unit, dan pada tahun 2018 telah dilakukan pengujian terhadap kendaraan sebanyak 55.053 unit

Tabel 2.13
Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas Perhubungan
Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018

Jenis Kendaraan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Mobil Barang	38,859	40,078	45,832	45,639	47,482	51.505
Mobil Bus	5,276	4,188	4,850	4,812	3,520	3.199
Mobil Penumpang	1,057	482	1,053	741	241	147
Tempelan	52	67	-	-	218	202
Jumlah	45,244	44,815	51,735	51,192	51,461	55.053

Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan, tahun 2018, diolah

f. Halte

Halte adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang. Keberadaan halte sebagai tempat menunggu kendaraan sangat diperlukan bagi masyarakat yang membutuhkan jasa angkutan umum. Data halte disajikan pada tabel 2.14

Tabel 2.14
Data Halte dan Kondisinya Tahun 2013-2018

No	Lokasi	Status Jalan	Kondisi
1	Jl. Raya Pemda Depan Pos Polisi Sebelah Kanan	Jl. Kabupaten	Baik
2	Jl. Raya Pemda Depan Pos Polisi Sebelah Kiri	Jl. Kabupaten	Baik
3	Jl. Raya Pemda Tigaraksa Depan Rumah Dinas Wakil Bupati	Jl. Kabupaten	Baik
4	Jl. Raya Serang Dpn Kantor Kec.Balaraja	Jl. Kabupaten	Baik
5	Jl. Raya Parahu Depan RSUD Balaraja	Jl. Kabupaten	Baik
6	Jl. Raya Pasir Nangka Depan Perum Mustika	Jl. Kabupaten	Baik
7	Jl. Raya Pasir Nangka Dpn SMA Tigaraksa	Jl. Kabupaten	Baik
8	Kawasan Puspem Tigaraksa samping Dinas PU Tigaraksa	Jl. Kabupaten	Baik
9	Jl. Raya Curug Depan Ps. Curug	Jl. Kabupaten	Baik
10	Jl. Raya Pemda SMP/SMA Mathlaul Anwar Ds.Matagara Kec. Tigaraksa	Jl. Kabupaten	Baik
11	Jl. Raya Pemda GG. H. Anawar Serdang Ds. Matagara Tigaraksa	Jl. Kabupaten	Baik
12	Jl. Raya Pemda Komp. SDN Matagara Tigaraksa	Jl. Kabupaten	Baik

13	Jl. Raya Pemda Ciapus Raya Ds. Budimulya Cikupa	Jl. Kabupaten	Baik
14	Jl. Raya Pemda Prapatan GG. Samprok Ds. Sukamulya Cikupa	Jl. Kabupaten	Baik
15	Jl. Raya Pemda GG. Bojong Jaya Ds. Bojong Jaya Cikupa	Jl. Kabupaten	Baik
16	Jl. Raya Serang – Balaraja SMU PGRI mandiri Balaraja.	Jl. Kabupaten	Baik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD
Tahun 2013-2018

uraian	Aggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Selisih Lebih/Berkurang				Realisasi 0% Anggaran Pada Tahun			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Pendapatan Asli Daerah	2.130.000.000	2.444.170.000	2.183.240.000	2.667.904.000	2.621.195.923	2.619.794.959	2.574.385.889	3.130.003.275	491.195.923	1.175.624.959	391.145.889	462.099.275	123,06	107,19	117,92	117,32
Belanja Tidak Langsung	6.840.536.448	7.535.816.147	7.676.477.567	6.689.416.602	5.909.109.601	6.324.437.587	6.136.417.090	6.597.699.277	931.426.847	1.211.378.560	1.540.060.477	91.717.325	86,38	83,93	79,94	98,63
Belanja Pegawai	6.840.536.448	7.535.816.147	7.676.477.567	6.689.416.602	5.909.109.601	6.324.437.587	6.136.417.090	6.597.699.277	931.426.847	1.211.378.560	1.540.060.477	91.717.325	86,38	86,69	85,69	98,63
Belanja Langsung	14.997.024.040	8.994.023.644	11.875.575.199	16.920.943.018	5.310.975.735	5.694.690.263	10.174.777.514	15.556.604.536	9.686.048.305	3.299.333.381	1.698.797.685	1.364.338.482	35,41	81,64	85,68	89,98
Belanja Pegawai	1.601.850.000	1.550.992.000	1.100.736.520	3.947.094.520	1.122.225.000	1.334.480.000	898.471.500	3.793.964.500	479.625.000	1.344.480.000	202.265.020	153.130.020	70,06	86,69	79,94	96,12
Belanja Barang dan Jasa	3.238.040.640	3.566.407.304	7.394.669.502	10.231.526.416	1.998.672.088	2.911.668.263	6.293.932.982	8.958.905.259	1.239.368.552	654.739.041	1.092.215.768	1.272.621.157	61,72	81,64	82,49	87,56
Belanja Modal	10.157.133.400	3.876.694.340	4.478.905.697	1.841.416.860	2.190.078.647	1.438.542.000	4.478.905.697	108.780.860	7.967.054.753	2.438.152.340	4.074.588.800	181.426.860	21,56	37,11	90,97	94,09

Sumber : Sekretariat Dinas Perhubungan, 2018, diolah

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Program
Tahun 2013-2018

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun				Realisasi 0% Anggaran Pada Tahun			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.093.816.640	1.546.902.304	1.799.019.670	12.072.943.276	819.038.188	1.451.905.068	1.629.271.414	10.691.541.259	74,88	92,78	90,56	88,56
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	2.559.794.400	1.638.661.340	1.775.411.081	-	924.345.680	1.159.174.945	1.191.014.080		36,11	70,74	67,08	
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	16.000.000	17.600.000		1.749.502.406	-	-		1.293.881.479	0	0		73,96
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.875.000	29.540.000	22.445.000	22.670.000	27.275.000	20.540.000	22.445.000	22.670.000	88,34	69,53	100	100
Program Peningkatan Perencanaan SKPD	52.350.000	70.100.000	62.647.000	95.730.000	51.850.000	52.000.000	54.197.000	83.130.000	99,04	74,18	86,51	86,84
Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan	5.706.350.000	574.970.000	281.205.948	478.659.000	432.926.000	480.005.000	110.217.500	458.480.000	7,59	84,48	39,19	95,78
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	150.800.000	400.000.000	320.000.000	849.822.000	148.275.000	206.847.250	269.899.000	531.582.400	98,33	51,71	84,34	62,55
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.075.797.800	927.635.000	1.016.082.000	924.492.000	840.226.800	82.235.000	846.221.600	888.125.000	78,10	8,87	83,28	96,07
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	19.644.000	20.760.000	-		149.652.067	-	-		76,10	0		
Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	2.642.165.200	3.749.855.000	5.766.814.500	4.942.209.750	1.071.598.000	2.241.983.000	5.278.025.920	4.774.482.900	40,56	59,79	91,92	96,61
Program Peningkatan Kelaikan Pengoprasian Kendaraan Bermotor	872.431.000	-	800.000.000	424.126.600	845.789.000	-	746.136.000	342.618.500	96,95	0	93,27	80,78
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	600.000.000	-	29.950.000		-	-	27.350.000		0	0	0	
Program Kerjasama informasi dan media massa			50.000.000					41.985.000				83,97

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2018, diolah.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Posisi geografis Kabupaten Tangerang yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan Jawa Barat sangat strategis bagi perkembangan wilayah, dimana Kabupaten Tangerang menjadi alternatif bagi DKI Jakarta yang sudah padat. Ditinjau dari segi transportasi, Kabupaten Tangerang dilalui oleh Jalan Raya Serang-Jakarta dan Jalan Tol Merak-Jakarta, *Double Track* Kereta Api Jakarta-Rangkas Bitung, serta akses alternatif ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan bagi Kabupaten Tangerang untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar kedepannya. Perluasan *Run Way* Bandara Soekarno-Hatta, pembangunan Tol Serpong-Balaraja, Tol Bandara-Balaraja, penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan *action plan* untuk meminimalisir dampak negatif baik kemacetan.

Proyeksi kondisi jalan akan dipenuhi oleh pengguna yang melintas di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga meningkatnya aktifitas masyarakat dan bertambahnya jumlah kendaraan pribadi. Untuk memberikan jaminan keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat perlu "dilaksanakan program dan kegiatan sebagai upaya “meningkatkan kinerja pelayanan perhubungan” kepada masyarakat dan layanan transportasi di antaranya :

1. Simpul transportasi antar moda
2. Penataan simpang geometrik
3. Penerapan Sistem Lalu Lintas Satu Arah
4. Pembangunan ATCS (Area Traffic Control Sistem)
5. Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CAR FREE DAY)

Tantangan yang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan selama lima tahun kedepan di antaranya :

1. Simpul transportasi antar moda
 - d. Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas jalan
 - e. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas
2. Kurangnya infrastruktur jalan yang memadai
 - c. Belum adanya penerapan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas satu arah
3. Tingginya tingkat jumlah kendaraan
 - a. Tingginya kebutuhan transportasi moda darat
 - b. Tingkat kesadaran dari masyarakat berlalu lintas masih rendah

Peluang dalam pengembangan pelayanan urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan antara lain :

1. Rencana pembangunan Jalur BRT, LRT dan MRT di Kabupaten Tangerang, menempatkan Kabupaten Tangerang pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah
2. Rencana pembangunan Sistem Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan di wilayah Kabupaten Tangerang
3. pengembangan Stasiun Kereta Api Cikuya di Kecamatan Solear, Stasiun Kereta Api Tigaraksa di Kecamatan Tigaraksa dan Stasiun Kereta Api Cicayur dan Stasiun Kereta Api Cisauk di Kecamatan Cisauk menjadi stasiun TOD (*Transit Oriented Development*); dan
4. pembangunan Stasiun Kereta Api Balaraja dan Stasiun Kereta Api Tigaraksa sebagai stasiun TOD (*Transit Oriented Development*).

BAB III

PERMASLAHAN DAN ISU-ISI STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMSALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salahsatu daerah tingkat II yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Secara astronomis, Kabupaten Tangerang terletak pada koordinat 106°20' hingga 106°44' Bujur Timur dan 5°58' hingga 6°21' Lintang Selatan. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang antara lain:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ±51 Km)
- Sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak

Kabupaten Tangerang secara geografis berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang menjadi pintu gerbang untuk hubungan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan fenomena interdependensi yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan wilayah. Sebagai bentuk efek pertumbuhan wilayah, trickling down dan backwash effect, terjadi bentuk hubungan yang sinergis antara kedua region tersebut. Jarak antara Kabupaten Tangerang dengan pusat pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) adalah sekitar 30 km. Keduanya dihubungkan dengan jalur transportasi darat (jalan) bebas hambatan Jakarta-Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera..

Transportasi semakin vital peranannya seiring dengan kemajuan perekonomian masyarakat dewasa ini, karena transportasi dapat berpengaruh pada kebutuhan –kebutuhan masyarakat dimana transportasi berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Dinas Perhubungan akan mengakomodir dengan baik kebutuhan masyarakat akan tersediaanya sarana, prasarana dan pelayanan jasa perhubungan, karena prasarana transportasi yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pergerakan masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran transportasi, Masalah tersebut disebabkan oleh belum tercapainya target Standar Pelayanan Minimal untuk penyediaan perlengkapan jalan, pertumbuhan kendaraan pribadi yang meningkat cukup pesat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas, dan kerusakan jalan akibat pelanggaran tonase.
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas
3. Belum adanya penerapan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas satu arah
4. Belum optimalnya kualitas layanan angkutan.

Masalah tersebut disebabkan oleh rendahnya load factor angkutan umum, keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi jalan antar moda relatif rendah, belum optimalnya ketersediaan dan fungsi prasarana pengujian dan terminal.

Selain itu telah diidentifikasi permasalahan pada lingkungan eskternal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional
1.	Dekade aksi keselamatan lalu lintas jalan darat Internasional periode 2011-2020	Terbitnya Perpres No. 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek	Melakukan sinkronisasi dengan rencana jaringan transportasi di Jabodetabek (Jutpi)
2.	Globalisasi Perekonomian	Pembangunan konektivitas nasional	Rencana Pembangunan BRT, LRT dan MRT Serta Terminal Type A, C yang terintegrasi
3.	Pemanfaatan teknologi informasi dalam bisnis	Munculnya angkutan tidak dalam trayek (online)	Rentan konflik angkutan umum konvensional dengan angkutan online

Dinamika Internasional

Indonesia mengambil sikap mendukung “Decade of Action for Road Safety” yang dicetuskan oleh PBB. Hal ini akan dinyatakan melalui kegiatan “Pencanangan Aksi keselamatan Jalan Indonesia” dengan pengesahan “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan” oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 11 Mei 2011. Tanggal 11 Mei 2011 merupakan tanda diawalinya “ Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020 yang menargetkan penurunan tingkat kecelakaan. Dalam Resolusi PBB no. 64/255 butir 7 diamanatkan kepada setiap negara anggota PBB untuk menetapkan targetnya masing-masing.

Tujuan Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020 :

- a. Melaksanakan platform global, regional dan nasional untuk mengurangi angka korban kecelakaan di jalan melalui program “Dekade Aksi Keselamatan Jalan RI (2011-2020) ;
- b. Mengesahkan dan meluncurkan dokumen “Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Jalan RI ;
- c. Mengajak semua pihak untuk berkontribusi dalam aksi penurunan jumlah korban kecelakaan d. Single Message : SAATNYA BERTINDAK ! (Time For Action)

- **Rekan Aksi Keselamatan Jalan Indonesia 2011-2020**

Pemerintah

Pemerintah berperan untuk memberikan panduan-panduan agar tercapainya keselamatan di Jalan. Panduan-panduan tersebut disediakan oleh Pemerintah.

Dinamika Nasional

Rencana Induk Transportasi Jabodetabek adalah sebagai dokumen acuan pembangunan transportasi bagi Pemerintah Daerah se Jabodetabek dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan pengendalian jasa pelayanan transportasi sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Visi penyelenggaraan dan pengelolaan transportasi Jabodetabek adalah mewujudkan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian transportasi Jabodetabek dalam rangka integrasi pelayanan transportasi yang tertib, lancar, efektif, efisien, aman, selamat, nyaman, dan terjangkau oleh masyarakat tanpa dibatasi oleh wilayah administratif.

Misi penyelenggaraan dan pengelotraan transportasi Jabodetabek adalah sebagai berikut:

1. Memadukan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi dan jaringan pelayanan transportasi baik intra moda maupun antar moda.
2. Memadukan pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan antar wilayah Jabodetabek dalam sahr kesahran wilayah perkotaan.
3. Mengintegrasikan pengoperasian transportasi perkotaan,
4. Mengintegrasikan riencana pembiayaan transportasi perkotaan.

Cakupan rencana induk ini meliputi 9 (sembilan) pilar kebijakan peobangunan transportasi di Jabodetabek yang meliputi:

1. Peninglatan keselamatan dan keamanan transportasi perkotaan;
2. Pengembangan jaringan prasarana transportasi perkotaan;
3. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasisjalan;
4. Pengembangan sistem transportasi perkotaan berbasis rel;
5. Pengembangan transportasi terintegrasi;
6. Peningkatan kinerja lalu lintas;
7. Pengembangan sistem pendanaan transportasi perkotaan;
8. Pengembangan keterpaduan transportasi perkotaan dan tata ruang; dan
9. Pengembangan transportasi perkotaan yang ramah lingfuungan.

Dinamika Regional

JUTPI adalah Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan dan ketentuan Undang-undang yang mempengaruhi Rencana Pengembangan Transportasi dalam rangka mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan memutakhirkan basis data transportasi perkotaan Jabodetabekserta melakukan revisi rekomendasi rencana induk transportasi hasil Study On Integrated Transportation Master Plan (SITRAMP).

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2018-2023 adalah: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”.

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya

Dinas Perhubungan sebagai OPD pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang dalam RPJMD 2018-2023 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait erat dengan pencapaian Misi 5 yaitu: “***Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah***”

Pembangunan berkelanjutan dan Pemerataan infrastruktur Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antar wilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena secara langsung peningkatan infrastruktur yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan ekonomi mampu mendorong kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Dengan demikian ketersediaan infrastruktur akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan tugas Dinas Perhubungan terhadap pencapaian Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana tabel 3.2

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi,
Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”.				
Misi 5 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Simpul Transportasi Antar Moda	1. Kurangnya Perlengkapan Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas Jalan 2. Belum Optimalnya Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas	Adanya pembangunan Terminal Type A dan C, serta BRT, LRT, MRT
	Program Manajemen Lalu Lintas	Kurangnya Infrastruktur Jalan Yang Memadai	1. Belum Adanya Penerapan Rekayasa Lalu Lintas dan Manajemen Lalu Lintas Satu Arah	
	Program Pelayanan Angkutan Umum (sitram)	Tingginya Tingkat Jumlah Kendaraan	1. Tingginya Kebutuhan Transportasi Moda Darat 2. Tingkat Kesadaran Dari Masyarakat Berlalu Lintas Masih Rendah	Masyarakat Masih Membutuhkan Angkutam Umum

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019

Sasaran pembangunan transportasi nasional berdasarkan RENSTRA Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019 adalah terwujudnya pertumbuhan sektor transportasi yang berkesinambungan; terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air; terwujudnya keselamatan, keamanan dan keandalan seluruh moda transportasi sesuai standar pelayanan minimal; terwujudnya profesionalisme SDM transportasi dan melanjutkan pelaksanaan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi; meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan.

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2015-2019) meliputi hal-hal sebagai berikut :

A. Keselamatan dan Keamanan

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

Strategi :

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;
- Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi;
- Penguatan kelembagaan.

2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

Strategi :

- Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keamanan transportasi;
- Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sektor transportasi.

B. Pelayanan

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

Strategi :

- Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan/rute;
- Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
- Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana transportasi.

2. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan;

Strategi :

- Menyusun Man Power Planning SDM transportasi;
- Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi;
- Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi;
- Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi;
- Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;
- Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

Strategi :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti;
- Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan pengguna jasa penelitian;
- Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset & industri;
- Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran Badan Litbang Perhubungan.

4. Meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance;

Strategi :

- Penuntasan agenda reformasi birokrasi;
- Integrasi system manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan;
- Penyederhaan perizinan dan penerapan e-government dilingkungan Kemenhub.

5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;

Strategi :

- Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi;
- Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya;

- Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih.
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
- Strategi :
- Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim;
 - Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan/EBT;
 - Penerapan system manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance;
- Strategi :
- Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan quality assurance;
 - Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM pengawasan.

C. Kapasitas Transportasi

1. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
- Strategi :
- Peningkatan kualitas sarana prasarana angkutan umum massal perkotaan;
 - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes;
 - Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda;
 - Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta;
2. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil.
- Strategi :
- Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah;
 - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
 - Penyediaan sarana angkutan keperintisan di wilayah perbatasan, terluar, terpencil dan rawan bencana.
3. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan;
- Penggunaan teknologi intelligent transport system (ITS), pembangunan area traffic control system (ATCS) pada perlengkapan jalan (APILL, PJU, warning light)

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Tingkat Kemacetan Lalu Lintas terus meningkat	1. Simpul Transportasi antar moda 2. Kurangnya infrastruktur yang memadai 3. Tingginya tingkat jumlah kendaraan	Komitmen Pemda; Kerjasama dengan Dishub Provinsi Banten

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Banten Tahun 2012-2017

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, memuat Visi pembangunan Provinsi Banten, yaitu: “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH” . Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
- 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
- 3) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
- 4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
- 5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Program/kegiatan prioritas Provinsi Banten yang berhubungan dengan Kabupaten Tangerang adalah :

- a) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di daerah meliputi : Serpong-Balaraja, Bojong Gede-Balaraja.
- b) Pengembangan jaringan Jakarta Outer Ring Road II yang meliputi Cengkareng – Batu ceper-Kunciran – serpong Serpong Cinere.
- c) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi : Tangerang-Merak, Semanan-Rajeg-Balaraja, Kamal-Teluknaga-Rajeg.
- d) Rencana Pengembangan jalan Nasional Tangerang-Bandara Soekarno Hatta
- e) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi : Banten Lama-Pontang, Pontang-Kronjo, Kronjo-Mauk, Mauk-Teluknaga, Teluknaga-Dadap, Citeras-Tigaraksa, Tigaraksa-Malanengah, Sp. Bitung-Curug, Curug-Legok-Parung Panjang, Cisauk-Jaha.
- f) Rencana Pengembangan Terminal Balaraja di Kabupaten Tangerang;
- g) Pengembangan jaringan Kereta Api, Serang-Cikande-Cikupa-Serpong.
- h) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada lintas Parung Panjang-Serpong-Citayam-Nambo-Cikarang; Lintas Serang-Sepadan tol-Balaraja, Lintas Balaraja-Jakarta-Cikarang.

- i) Rencana Pembangunan Dryport di Kecamatan Jambe
- j) Pengembangan Angkutan Massal cepat terpadu berbasis Rel Cilegon – Serpong – Pandeglang – Rangkas Bitung dan jalur MRT Lintas Batu Ceper Serpong.
- k) Pengembangan Angkutan Massal cepat terpadu berbasis Rel dari wilayah Timur Ke Wilayah Barat yaitu Cikarang – Jakarta – Balaraja – Serang;
- l) Rencana Pembangunan Transit Oriented Depelopment /TOD diseluruh Provinsi Banten;
- m) Pengembangan Stasiun Kereta api termasuk Park and Ride Pada PusatStarategis Nasional, Provinsi Kabupaten dan Kota meliputi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp): Balaraja dan Teluknaga; dan Pusat kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi perkotaan Kronjo dan Tigaraksa;
- n) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyebarangan di Provinsi Banten meliputi Cituis-Kep. Seribu, Dadap-Kep. Seribu.
- o) Rencana pengembangan lokasi wilayah kerja pelabuhan pengumpan lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo.
- p) Rencana pengembangan lokasi wilayah kerja pelabuhan penimbang lokal di Pakuhaji dan Sepatan.
- q) Koridor Utara (Koridor Ekonomi Banten) menghubungkan sentra-sentra pertumbuhan primer Tangerang-Balaraja-Cikupa-Serang-Cilegon-Merak.
- r) Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Udara di Bandar Udara Budiarto di Kabupaten Tangerang sebagai Bandar Udara diperuntukan khusus sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan di Indonesia.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KLHS

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 merada pada tahapan keempat RPJPD yaitu tahap usaha peningkatan berkelanjutan. Berdasarkan pencapaian pembangunan selama tiga periode yang dilaksanakan secara konsisten, maka tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegenap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Strategi yang dilakukan pada tahapan ini adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan
3. Meningkatkan kualitas SDM
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan
5. Mengendalikan rencana tata ruang wilayah
6. Mengendalikan kualitas lingkungan hidup

3.4.2 Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah “**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera**” dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan.

3.4.3 Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Tangerang meliputi sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan prasarana lainnya.

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi meliputi :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. Sistem jaringan transportasi udara.

1. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan transportasi darat meliputi:

- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan kereta api;
- c. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

a. Sistem Jaringan Jalan

- a. Jaringan jalan nasional;
- b. Jaringan jalan provinsi;
- c. Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- d. Terminal penumpang;
- e. Terminal barang; dan
- f. jembatan-jembatan timbang.

1. Jaringan jalan nasional, meliputi :

a. Jaringan jalan arteri primer, meliputi :

1. peningkatan ruas Jalan Raya Serang yang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti dengan panjang jalan kurang lebih 26 (dua puluh enam) kilometer.
2. peningkatan ruas Jalan Pamulang–Maja yang melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear.

b. Jaringan jalan tol meliputi :

1. peningkatan jalan tol Tangerang–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
2. rencana ruas jalan tol Sepatan Timur–Pakuhaji–Teluknaga–Kosambi–Bandara Soekarno Hatta melalui Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi yang merupakan bagian sistem jaringan jalan tol JORR II;
3. rencana ruas jalan tol Balaraja–Serpong melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Jambe, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan;
4. rencana ruas jalan tol Kamal–Teluknaga–Rajeg–Balaraja melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Balaraja.
5. rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar masuk ke arah Cikupa di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja;
6. rencana pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar ke arah Pasar Kemis di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa;
7. rencana ruas jalan tol Semanan – Rajeg – Balaraja;

8. rencana ruas jalan tol prospektif yang terhubung ke Jalan Tol Serpong-Balaraja; dan
9. rencana simpang susun jalan tol.

2. Jaringan Jalan Provinsi

Jaringan Jalan Provinsi berupa jalan kolektor primer yang meliputi:

- a. rencana peningkatan ruas jalan Kronjo–Mauk–Teluknaga–Bandara Soekarno-Hatta yang melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) kilometer.
- b. rencana peningkatan ruas jalan Tigaraksa–Cisoka–Cikuya–Cikasungka yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Pusat Pemerintahan Kabupaten Lebak, melewati kecamatan Tigaraksa, Cisoka dan kecamatan Solear, dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
- c. rencana peningkatan ruas jalan Malang Nengah – Ranca Kelapa – Kutruk – Tigaraksa yang menghubungkan Kecamatan Legok dengan pusat pemerintahan Kabupaten, melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa, dengan panjang kurang lebih 16 (enam belas) kilometer;
- d. rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Jaha yang merupakan akses dari Cisauk menuju Legok, melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok, dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) kilometer; dan
- e. rencana peningkatan ruas jalan Bitung–Curug–Legok-Parung melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok dengan panjang kurang lebih 18 (delapan belas) kilometer;
- f. Rencana pengembangan Angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT)

3. Peningkatan Jaringan Jalan Kolektor (Kewenangan Kabupaten)

Rencana Jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berupa peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:

- a. Rencana peningkatan jaringan jalan kolektor meliputi:
 1. ruas jalan Bojong–Pemda yang menghubungkan Pusat Pemerintahan Kabupaten dengan Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
 2. ruas jalan Cikupa–Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 (dua puluh) meter
 3. ruas jalan Jatiuwung–Pasar Kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis dengan ROW 20 (dua puluh) meter
 4. ruas jalan Sepatan–Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter

5. ruas jalan Kronjo–Ceplak-Pejamuran melewati berada di Kecamatan Kronjo,Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
6. ruas jalan Balaraja–Ceplak melewati Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
7. ruas jalan Kutruk–Jambe melewati Kecamatan Jambe dengan ROW 20(dua puluh) meter
8. ruas jalan Kresek–Jenggol melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru dengan ROW 20 (dua puluh) meter
9. ruas jalan Kresek–Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekar Baru dengan ROW 20 (dua puluh) meter
10. ruas jalan Ceplak–Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
11. ruas jalan Dangdeur–Patrasana melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek dengan ROW 13 (tiga belas) meter
12. ruas jalan Jayanti–Megu melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 (dua puluh) meterdan;
13. ruas jalan Cisoka–Megu berada di Kecamatan Cisoka dengan ROW 20 (dua puluh) meter
14. ruas jalan Cangkudu–Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter.
15. ruas jalan Cikuya–Cikasungka (Bts. Bogor) berada di Kecamatan Solear dengan ROW 20 (dua puluh) meter
16. ruas jalan Tigaraksa–Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear dengan ROW 20 (dua puluh) meter
17. ruas jalan Cibadak–Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa dengan ROW 20 (dua puluh) meter
18. ruas jalan Tigaraksa–Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter
19. ruas jalan Jambe–Batok berada di Kecamatan Jambe dengan ROW 20 (dua puluh) meter
20. ruas jalan Serdang Kulon–Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
21. ruas jalan Pasar Korelet–Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan dengan ROW 20 (dua puluh enam) meter
22. ruas jalan Cikupa–Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 20 (dua puluh) meter
23. ruas jalan Curug–Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 11 (sebelas) meter
24. ruas jalan Curug–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 (dua puluh) meter

25. ruas jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)–Binong berada di Kecamatan Curug dengan ROW 20 (dua puluh) meter
26. ruas jalan Binong–Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 (dua puluh) meter
27. ruas jalan Curug–Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- ~~28.~~ ruas jalan Legok–Pagedangan melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
29. ruas jalan Cisauk–Rumpin melewati Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
30. ruas jalan Jambu–Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
31. ruas jalan Rajeg–Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk dengan ROW 20 (dua puluh) meter
32. ruas jalan Pasar Kemis–Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 20 (dua puluh) meter
- ~~33.~~ ruas jalan Jati Gintung–Cituis–Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri dengan ROW 20 (dua puluh) meter
34. ruas jalan Gardu–Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
35. ruas jalan Sepatan–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
36. ruas jalan Bayur Sangego–Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan Timur dengan ROW 20 (dua puluh) meter
37. ruas jalan Kedaung Barat–Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji dengan ROW 20 (dua puluh) meter
38. ruas jalan Bojong Renged–Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
39. ruas jalan Teluknaga–Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
40. ruas jalan Pangkalan–Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga dengan ROW 20 (dua puluh) meter
41. ruas jalan Bojongrenged–Kosambi berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
42. ruas jalan Jatimulya–Dadap berada di Kecamatan Kosambi dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
43. ruas jalan Merak–Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya ROW 20 (dua puluh) meter
44. ruas jalan Jambu–Buniayu–Jengkol melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter

45. ruas jalan Kukun–Daon-Jambu berada di Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
 46. ruas jalan Cadas-Kukun melewati Kecamatan Sepatan, KecamatanPasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
 47. ruas jalan Suradita-Kranggan berada di Kecamatan Cisauk dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
 48. ruas jalan Karawaci–Legok melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok dengan ROW 20 (dua puluh) meter
 49. ruas jalan yang melewati Bojong-Peusar-Budimulya di Kecamatan Curug dan Kecamatan Tigaraksa dengan ROW 26
 50. rencana peningkatan jembatan yaitu jembatan Kelapa Dua mulai dari batas Kota Tangerang ke arah perumahan villa permata di Kecamatan Kelapa Dua
 51. Rencana pengembangan Angkutan massal berbasis jalan dapat berupa Bus Rapid Transit (BRT)
 52. rencana peningkatan ruas jalan Cisauk–Kranggan, berada di Kecamatan Cisauk
4. Peningkatan Jaringan Jalan Lokal dan Jembatan (Kewenangan Kabupaten)
- Rencana pembangunan jaringan jalan lokal dan jembatan meliputi :
1. ruas jalan pesisir pantai dari Kohod–Tanjung Burung–Tanjung Pasir– Muara–Lemo–Salembaran Jaya–Kosambi Barat–Kosambi Timur–Dadap, melewati Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi dengan ROW 20 (dua puluh)
 2. ruas jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung–Kronjo–Pagedangan Ilir–Lontar –Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur– Ketapang melewati kecamatan Mekar baru, Kronjo, Kemiri dan kecamatan Mauk dengan ROW 20 (dua puluh) meter
 3. ruas jalan poros tengah yang meliputi ruas jalan Cikupa–Sindangjaya–Rajeg–Mauk–Kawasan Reklamasi, melewati KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 2 (dua puluh) meter
 4. ruas jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa – Desa Cibadak Kecamatan Balaraja, melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja dengan ROW 20 (dua puluh) meter
 5. ruas jalan Cadas–Kukun–Benda–Buniayu–Jengkol, melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek dengan ROW 30 (tiga puluh) meter
 6. ruas jalan Peusar–Budimulya–Bojong–Jalan Raya Serang, melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter dan panjang kurang lebih 4 (empat) kilometer;

7. ruas jalan Desa Margasari–Desa Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan, dengan ROW 26 (dua puluh enam) meter
8. ruas jalan Sampora–Pakulonon melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua dengan ROW 36 (tiga puluh enam) meter
9. ruas jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk dengan ROW 30 (tiga puluh) meter;
10. Ruas jalan Ruas jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari ruas MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja – Cikarang melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua;
11. ruas jalan kantor pos - Pasar Gudang di Kecamatan Tigaraksa
12. ruas jalan ciatuy – Al-Amjad di Kecamatan Tigaraksa
13. ruas jalan dan jembatan penghubung wilayah perbatasan
14. ruas jalan yang memanfaatkan daerah sempadan sungai
15. ruas jalan akses diperluas Perimeter Utara bandara Soekarno Hatta sebagai pengganti penutupan M1 yang melewati Desa Rawa Rengas dan Desa Bojongrenged Kecamatan Teluknaga, Desa Rawa Burung dan Desa Jatimulya Kecamatan Kosambi.
16. jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kelapa Dua dan Kelurahan pondok Jagung, Serpong Utara (Ash-Shobirin) (Kota Tangerang Selatan)
17. jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
18. jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang di Kecamatan Sepatan Timur dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter;
19. jembatan Sukadiri di Kecamatan Sukadiri dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
20. Jembatan Dadap I di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter; dan
21. Jembatan Dadap II di Kecamatan Kosambi dengan panjang kurang lebih 100 (seratus) meter.
22. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji dengan panjang jembatan kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) meter
23. Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Bitung Jalan Raya Serang di Kecamatan Curug
24. Pembangunan jembatan layang/flyover Pasar Cikupa Jalan Raya Serang di Kecamatan Cikupa.
25. Pembangunan jembatan layang/flyover Stasiun Kereta Api Cisauk di kecamatan Cisauk

26. Pembangunan jembatan layang/flyover simpang Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua
 27. Pembangunan jembatan layang/flyover simpang bugel di Kecamatan Tigaraksa
 28. Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja timur di Kecamatan Balaraja
 29. Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja barat di Kecamatan Balaraja
 30. Pembangunan jembatan layang/flyover di Kecamatan Tigaraksa
 31. Pembangunan jembatan layang/flyover gembong balaraja di Kecamatan Balaraja
 32. Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau di Kecamatan Kosambi.
- b. Rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan di wilayah Kabupaten Tangerang
5. Terminal
1. rencana pembangunan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Kelapa Dua;
 2. peningkatan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Balaraja;
 3. pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Cisauk; Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Kronjo.
 4. optimalisasi dan peningkatan sub terminal Cisoka dan terminal sentiong di Kecamatan Balaraja menjadi terminal tipe C;
- c. Terminal barang meliputi pembangunan terminal barang di Kecamatan Mauk, pembangunan terminal barang *dry port* di Kecamatan Jambe.
- d. Jembatan timbang berada di Kecamatan Legok, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kosambi dan jalan Nasional.

Sistem Jaringan Kereta Api

Sistem jaringan perkeretaapian merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi:

- a. pengembangan sistem rel ganda (*double track*) yang akan melewati Kecamatan Cisauk–Kecamatan Pagedangan–Kecamatan Legok– Kecamatan Panongan–Kecamatan Jambe–Kecamatan Cisoka;
- b. pengembangan Stasiun Kereta Api Daru di Kecamatan Jambe;
- c. pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti;
- d. pembangunan jaringan perkeretaapian yang akan melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Mekarbaru;
- e. pembangunan MRT dan/atau LRT Balaraja-Cikarang yang melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Balaraja;

- f. pembangunan LRT lingkar antara Bandara Soekarno-Hatta-Alam Sutera-BSD City-Sumarecon/Paramount Lippo Karawaci-Citra Raya-Suvarna Padi Cikupa-Kawasan Pantura Teluknaga/Kosambi-Bandara Soekarno Hatta;
- g. pengembangan Stasiun Kereta Api Cikuya di Kecamatan Solear, Stasiun Kereta Api Tigaraksa di Kecamatan Tigaraksa dan Stasiun Kereta Api Cicayur dan Stasiun Kereta Api Cisauk di Kecamatan Cisauk menjadi stasiun TOD (*Transit Oriented Development*); dan
- h. pembangunan Stasiun Kereta Api Balaraja dan Stasiun Kereta Api Tigaraksa sebagai stasiun TOD (*Transit Oriented Development*).

Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyebrangan

Jaringan sungai, danau dan penyebrangan merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyebrangan meliputi:

- a. pelabuhan penyebrangan dan pelabuhan pengumpan di Desa Surya bahari, Kecamatan Pakuhaji ke Kepulauan Seribu
- b. dermaga tambatan kapal nelayan dan penyebrangan di Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga ke Kepulauan Seribu
- c. dermaga tambatan kapal nelayan di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji
- d. Rencana Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau sebagai Pelabuhan Pengumpan di Kecamatan Sepatan Timur
- e. Rencana pelabuhan barang di Kecamatan Teluknaga

2. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan laut dan alur pelayaran.

a. Rencana Pembangunan Pelabuhan laut

- rencana pelabuhan orang dan barang di Kecamatan Teluknaga;
- rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan bagian dari Pelabuhan Tanjung Priok di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berada di kawasan reklamasi Pantura; dan
- rencana pembangunan pelabuhan khusus batu bara di Kecamatan Kronjo
- rencana lokasi pelabuhan pengumpan lokal Muara Dadap di Kecamatan Kosambi;

b. Alur Pelayaran

Alur pelayaran sebagaimana akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.

3. Sistem Jaringan Transportasi Udara

Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara dan ruang udara.

a. Bandar Udara

Bandar udara meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil dan pusat pelatihan penerbangan.

- Bandar udara yang berfungsi sebagai penerbangan komersil ditetapkan di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta sebagai bandar udara pengumpul skala primer yang terletak di Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Teluknaga dan Bandar Udara Soekarno Hatta II yang terletak di pulau reklamasi.
- Bandar udara yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan latihan penerbangan ditetapkan di Bandar Udara Budiarto Curug di Kecamatan Legok.

b. Ruang Udara

Ruang udara merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas:

1. KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi Kecamatan Teluknaga;Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Sindangjaya; dan Kecamatan Cikupa.
2. KKOP Bandara Budiarto meliputi : Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/ Kota	Sebagai faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana pembangunan Sistim Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan diwilayah Kabupaten Tangerang	Kesiapan dalam Penyediaan perlengkapan jalan dan manajemen lalu lintas	Belum adanya rencana induk transportasi	Konektivitas antara wilayah meningkat
2	Rencana Pembangunan Jalur LRT, MRT, dan BRT	Kesiapan infrastruktur pendukung sektor perhubungan	Usulan pembangunan perlengkapan jalan Belum terpenuhi keseluruhan	Komitmen yang kuat untuk mewujudkan

3.4.4 Kebijakan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang

1. Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas (PEKAT LANTAS)

Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia.

Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan antara lain pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Maka perlu penanganan untuk memelihara kondisi jalan atau pembukaan akses terutama pada simpang-simpang geometri dan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga untuk mengatasi kemacetan akan dibangun fly over dan Terminal Tipe C. OPD yang menangani program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan.

3.4.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Isu dari bidangin frastruktur menyangkut suprasarana, perencanaan dan pemanfaatan ruang, transportasi, dan infastruktur. Secara umum, pemerataan pembangunan antar daerah merupakan arahan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah melalui upaya penyebaran kegiatan ekonomi, social, budaya, penduduk dan pusat-pusat kegiatan.

Terjadi disparitas pertumbuha antara kawasan selatan dan kawasan barat Kabupaten Tangerang, sementara pemanfaatan dan intensitas kawasan selatan dan tengah sudah sangat padat dan ruang terbuka untuk umum (publicspace) sangat terbatas termasuk penyediaan infrastruktur dan perhubungan seperti jalan, jembatan, akses bagi pejalan kaki, akses bagi pesepeda, jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telekomunikasi, jaringan transportasi bagian sudah terpenuhi. Pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi pada wilayah-wilayah strategis, dan kawasan pengembangan, perlu diarahkan melalui perencanaan tata ruang, pemanfaatan, dan pengendaliannya pada kawasan strategis.

Disisi lain isu mengurangi kemacetan yaitu melalui pengelolaan transportasi massal yang tepat sasaran, terjangkau dan interkoneksi antarmoda menjadi tantangan, seperti interkoneksi antara transportasi udara dengan transportasi darat. Integrasi perencanaan transportasi dengan pengembangan wilayah menjadi tantangan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Rumusan isu strategis yang akan ditangani dengan Rencana Strategis sebagai berikut:

5. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kemacetan yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara
6. Peningkatan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target SPM Bidang Perhubungan;
7. Rencana pembangunan Jalur BRT, LRT dan MRT di Kabupaten Tangerang, menempatkan Kabupaten Tangerang pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah
8. Rencana pembangunan Sistem Jaringan Transportasi Angkutan Massal (Terminal Tipe A dan Terminal Tipe C) cepat terpadu berbasis jalan di wilayah Kabupaten Tangerang

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI DAN MISI

4.1.1 Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah gambaran dari arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa periode jabatan selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2023 sesuai dengan misi yang dijalankan. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang terpilih adalah ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”***.

4.1.2 Misi

Misi adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Pernyataan misi harus disampaikan dengan jelas karena digunakan untuk memberikan arahan cara kerja demi terwujudnya sebuah visi. Misi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

- Misi I : Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius
- Misi II : Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
- Misi III : Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif, berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK), Koperasi dan Industri Kecil Menengah (IKM).
- Misi IV : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
- Misi V : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
- Misi VI : Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.

4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Adapun Tujuan yang akan dicapai lima tahun kedepan adalah : ***Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”***

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

MISI		TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR
1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban
2	Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Angka IPM	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup
				Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Angka Melanjutkan Sekolah
3	Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan	Meningkatnya Ekonomi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Menurunnya Kemiskinan	Prosentase Penduduk Miskin
				Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan	Indeks Tingkat Daya Beli
				Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

MISI		TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SASARAN RPJMD	INDIKATOR
4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP
				Meningkatnya Integritas Aparatur	Indeks Persepsi Korupsi
				Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah	Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah	Indeks Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik
		Melestarikan fungsi Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
6	Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya.	Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah

BAB V

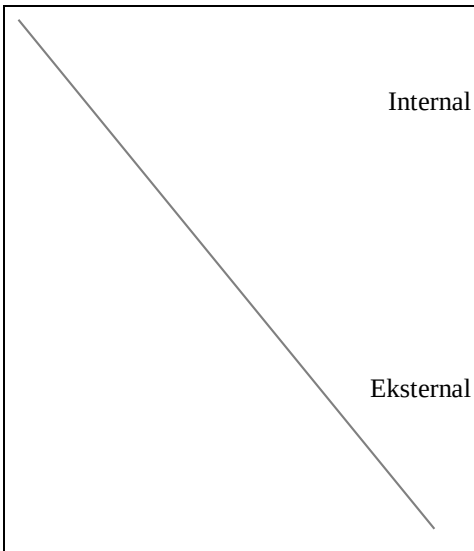
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan.

Hasil akhir identifikasi factor-faktor internat dan eksternal Dinas Perhubungan guna penentuan alternative strategi berdasarkan pencermatan dan Focussed Group Discussion untuk merumuskan strategi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan menetapkan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisa SWOT

	Internal	STRENGTH	WEAKNESS
	Eksternal	1. Adanya komitmen pimpinan terhadap meningkatnya pelayanan Perhubungan 2. Adanya SDM yang potensial 3. Koordinasi dengan instansi terkait berjalan baik 4. Sarana dan prasarana operasional pelayanan yang dimiliki 5. Jaringan trayek yang memadai	1. Kuantitas dan kualitas SDM kurang memadai 2. Kurangnya prasarana operasional kerja yang memadai 3. Kurangnya perlengkapan sarana dan prasarana perlengkapan angkutan jalan 4. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian lalu lintas 5. Belum adanya penerapan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas satu arah. 6. Tingginya Kebutuhan Transportasi Moda Darat 7. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya
OPPORTUNITY		STRATEGI SO	STRATEGI SW
1. Adanya perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah di bidang LLAJ 2. Rencana pembangunan BRT, MRT, dan LRT 3. Rencana Pembangunan Tipe C dan Tipe A 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan transportasi (ATCS) 5. Kesadaran masyarakat dalam pengawasan outcome kerja instansi pemerintah		1. Meningkatkan kualitas aparatur Perhubungan 2. Meningkatkan kualitas prasarana kerja	1. Meningkatkan kinerja perlengkapan jalan 2. Meningkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas
THREAT		STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan dan ketertiban lalu lintas 2. Prosentase pertumbuhan kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada 3. Rendahnya penggunaan angkutan umum dan mulai munculnya angkutan online 4. Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji dalam mengujikan kendaraannya 5. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum		1. Meningkatkan kualitas sarana perhubungan 2. Meningkatkan kualitas prasarana perhubungan	1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lalu lintas 2. Meningkatkan sosialisasi etika berlalu lintas

Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Tahun 2018-2023, sesuai dengan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Menyediakan Perlengkapan Jalan Sesuai dengan Kebutuhan Transportasi / Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
2. Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara Profesional
3. Membuat Jaringan Trayek sesuai Kebutuhan baik Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek
4. Penyusunan Kajian Simpul , Kajian Kebutuhan Transportasi dan perlengkapan jalan

Arah kebijakan adalah petunjuk yang digunakan sebagai pemandu pelaksana dan pemangku kepentingan, agar strategi efektif dalam mewujudkan Visi Renstra. Arah Kebijakan kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Melakukan Operasi Tertib Lalu Lintas
2. Penetapan Kendaraan Layak Uji dan Usia Kendaraan Angkutan
3. Menyediakan Moda Transportasi Angkutan

Pembangunan Simpul Transportasi Baik Antar Moda Maupun Intermoda dan perlengkapan jalan

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	1	Meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas	1	Menyediakan Perlengkapan Jalan Sesuai dengan Kebutuhan Transportasi / Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Melakukan Operasi Tertib Lalu Lintas
			2	Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor secara Profesional	Penetapan Kendaraan Layak Uji dan Usia Kendaraan Angkutan
	2	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	1	Membuat Jaringan Trayek sesuai Kebutuhan baik Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek	Menyediakan Moda Transportasi Angkutan
			2	Penyusunan Kajian Simpul, Kajian Kebutuhan Transportasi dan perlengkapan jalan	Pembangunan Simpul Transportasi Baik Antar Moda Maupun Intermoda dan perlengkapan jalan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang dalam kurun waktu lima Tahun Pertama (2019) sampai dengan Tahun Kelima (2023), maka rencana program dan kegiatan, indicator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam table 6.1

PROGRAM SKPD																						
Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang																						
Tahun 2019 - 2023																						
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang																	0	Sekretariat	DISHUB Kabupaten Tangerang	
			1209,01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Rata-rata pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen		100%	12.501.080.000	100%	12.592.560.000	100%	12.642.560.000	100%	12.692.560.000	100%	12.742.560.000	100%	63.171.320.000	Sekretariat	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya pengelolaan dan pelaporan kearsipan		Bulan		12	71.000.000	12	71.000.000	12	71.000.000	12	71.000.000	12	71.000.000	60	355.000.000	Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sda, listrik, dan internet		Bulan		12	678.000.000	12	750.000.000	12	800.000.000	12	850.000.000	12	900.000.000	60	3.978.000.000		
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan gedung kantor		Bulan		12	192.960.000	12	192.960.000	12	192.960.000	12	192.960.000	12	192.960.000	60	964.800.000		
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		Item		36	200.000.000	39	200.000.000	39	200.000.000	39	200.000.000	39	200.000.000	192	1.000.000.000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Item		14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	14	200.000.000	70	1.000.000.000		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor		Item		14	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	14	100.000.000	70	500.000.000		
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan surat kabar nasional / daerah		Bulan		12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	750.000.000		
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat		Bulan		12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	12	132.000.000	60	660.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi		Bulan		12	1.450.000.000	12	1.415.000.000	12	1.415.000.000	12	1.415.000.000	12	1.415.000.000	60	7.110.000.000		
				Penyediaan jasa administrasi / teknis pendukung perkantoran Non PNS	Tersedianya jasa administrasi / teknis pendukung perkantoran Non PNS		Bulan		12	9.261.600.000	12	9.261.600.000	12	9.261.600.000	12	9.261.600.000	12	9.261.600.000	60	46.308.000.000		
				Penyediaan jasa pengamanan kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor		Bulan		12	65.520.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	60	545.520.000		
Menigkatkan Kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	1209,02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Rata-rata pemenuhan sarana prasarana aparatur	Persen		100%	4.100.960.000	100%	4.711.920.000	100%	4.926.920.000	100%	5.146.920.000	100%	5.456.920.000	100%	24.343.640.000	Sekretariat	DISHUB Kabupaten Tangerang
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor		Jenis		5	350.000.000	6	360.000.000	6	365.000.000	6	370.000.000	6	375.000.000	29	1.820.000.000	Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor		Jenis		5	300.000.000	9	350.000.000	9	360.000.000	9	365.000.000	9	370.000.000	41	1.745.000.000		
				Pengadaan alat-alat kebersihan	Tersedianya alat-alat kebersihan		Item		21	25.000.000	25	35.000.000	25	35.000.000	30	45.000.000	30	45.000.000	131	185.000.000		
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor		Jenis		3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	15	1.500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional		Bulan		12	585.000.000	12	785.000.000	12	985.000.000	12	1.185.000.000	12	1.385.000.000	60	4.925.000.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor		Bulan		12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	750.000.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor		Bulan		12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	60	750.000.000		
				Penyediaan Jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan	Terpeliharanya Operasional Kendaraan Kendaraan Dinas/Jabatan		Bulan		12	1.240.960.000	12	1.240.960.000	12	1.240.960.000	12	1.240.960.000	12	1.240.960.000	60	6.204.800.000		
				Pemeliharaan rutin kendaraan operasional pju	Terpeliharanya Kendaraan Operasional PJU		Bulan		12	1.000.000.000	12	1.240.960.000	12	1.240.960.000	12	1.240.960.000	12	1.240.960.000	60	5.963.840.000		
				Penataan Ruang Hijau di SKPD	Tersedianya Ruang terbuka Hijau		Lokasi				1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	5	500.000.000		
Meningkatkan Kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	1209,03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase pemenuhan aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin	Jumlah aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin dibagi jumlah aparatur perangkat daerah	Persen		100%	518.000.000	100%	310.000.000	100%	645.000.000	100%	337.500.000	100%	670.000.000	100%	2.480.500.000	Sekretariat	DISHUB Kabupaten Tangerang
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian seragam dinas beserta perlengkapannya		Stel		63	40.000.000	68	80.000.000	71	85.000.000	73	100.000.000	74	110.000.000	349	415.000.000	Bagian Umum dan Kepagawaian	
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan'	Tersedianya pakaian seragam kerja lapangan dinas beserta perlengkapannya		Stel		164	328.000.000	34	80.000.000	164	410.000.000	37	87.500.000	164	410.000.000	563	1.315.500.000		
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu		Stel		63	150.000.000	68	150.000.000	71	150.000.000	73	150.000.000	74	150.000.000	349	750.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menigkatkan Kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	1209,04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Pemenuhaan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek di bagi jumlah aparatur	Persen		20%	700.000.000	20%	750.000.000	20%	775.000.000	20%	800.000.000	20%	825.000.000	100%	3.850.000.000	Sekretariat	DISHUB Kabupaten Tangerang
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang ikut sertakan dalam Penddidikan dan pelatihan Formal	Orang	14	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	14	500.000.000	70	2.500.000.000	Bagian Umum dan Kepagawaian			
				Penyelenggaraan Hari-Hari Besar dan Nasional	Jumlah orang yang di ikut sertakan dalam HUT Perhubungan	Orang	100	200.000.000	100	250.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	500	1.350.000.000	Bagian Umum dan Kepagawaian			
Menigkatkan Kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	1209,05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan yang di susun di bagi jumlah dokumen pelaporan yang wajib di penuhi	Persen		100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	54.000.000	100%	270.000.000	Sekretariat	DISHUB Kabupaten Tangerang
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja	Dokumen	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	5	135.000.000	Bagian Keuangan			
				Penyusunan Laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Dokumen	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	1	27.000.000	5	135.000.000				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
									Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
									2019		2020		2021		2022		2023					
									Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menigkatkan Kinerja perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	1209,06	Program Peningkatan Perencanaan SKPD	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipenuhi	Persen		100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	100%	445.000.000	100%	2.025.000.000	Sekretariat	DISHUB Kabupaten Tangerang
				Penyusunan Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen forum OPD		Dokumen		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	250.000.000	Bagian Perencanaan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen DPA, DPPA		Dokumen		2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	10	350.000.000		
				Penyusunan Renstra	Jumlah dokumen rencana strategis (Renstra)		Dokumen									1	50.000.000	1	50.000.000			
				Penyusunan Renja	Jumlah dokumen rencana kerja (Renja)		Dokumen		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	5	125.000.000		
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan		Dokumen		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000		
				Inventarisasi Aset/barang daerah	Jumlah dokumen inventarisasi aset OPD		Dokumen		1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					sub item	Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Pada Masyarakat Pelajar	Terselenggaranya Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Pada Masyarakat Pelajar	Jumlah orang yang ikut penyuluhan	Orang	-			60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	240	400.000.000		
					sub item	Pemilihan Duta Keselamatan Lalu Lintas Untuk Pelajar	Terpilihnya Duta Keselamatan Lalu Lintas Untuk Pelajar	jumlah pelajar yang ikut pemilihan duta keslamatan lalu lintas	Orang	-			45	100.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000	45	100.000.000	180	400.000.000		
					sub item	Pembinaan DISHUB Cilik (DISCIL)	Terselenggaranya Pembinaan DISHUB Cilik (DISCIL)	Jumlah orang yang ikut sertakan dalam pembinaan	Orang	-			50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	200	400.000.000		
					sub item	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya Sopir/juru Mudi/Awak/Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah sopir angkutan yang ikut pemilihan	Orang				60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	240	400.000.000		
					sub item	Pembinaan Teknis Penjaga Pintu Perkotaan	Terlaksananya Pembinaan Teknis Penjaga Pintu Perkotaan	Jumlah yang ikut Pembinaan Teknis Penjaga Pintu Perkotaan	Orang				50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	200	800.000.000		
					sub item	Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	Terbangunnya Taman Edukatif	Jumlah Yang Terbangun	Titik	-			1								1	-	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN	
					sub item	Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana	Jenis						17	1.500.000.000					17	1.500.000.000		
					sub item	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	Bangunan yang terpelihara	Bangunan						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000		
					1209.120901.16.001	Kegiatan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Pelayanan Perhubungan	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	700.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
					1209.120901.16.006	Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Pada Masyarakat Pelajar	Terselenggaranya Penyuluhan Keselamatan Lalu Lintas Pada Masyarakat Pelajar	Jumlah orang yang ikut penyuluhan	Orang	-	60	100.000.000										100.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
					1209.120901.16.007	Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Terselenggaranya Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah pelajar yang ikut disertakan	Orang		60	100.000.000										100.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
					1209.120901.16.008	Pemilihan Duta Keselamatan Lalu Lintas Untuk Pelajar	Terpilihnya Duta Keselamatan Lalu Lintas Untuk Pelajar	jumlah pelajar yang ikut pemilihan duta keslamatan lalu lintas	Orang	-	45	100.000.000										100.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
					1209.120901.16.014	Sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terselenggaranya Sosialisasi Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah orang yang sosialisasi	Orang	-	60	100.000.000									60	100.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
					1209.120901.16.036	DED. Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	Tersedianya DED. Pembangunan Taman Edukatif Keselamatan Transportasi	Jumlah hasil DED	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Peningkatan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkotaan	Terpasangnya Prasarana dan Fasilitas Pendukung Transportasi Perkotaan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Transportasi Perkotaan	Lokasi				1	2.500.000.000	1	2.700.000.000	1	2.700.000.000	1	2.700.000.000	1	10.600.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					sub item	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkpaan Jalan di Perlintasan Kereta Api	Tersedianya Perlengkpaan Jalan di Perlintasan Kereta Api	Jumlah lokasi yang terpasang	Lokasi				1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000		2.500.000.000	3	10.000.000.000		
					sub item	Pemeliharaan Perlengkpaan Jalan di Perlintasan Kereta Api	Terpeliharaan Perlengkpaan Jalan di Perlintasan Kereta Api	jumlah yang dipelihara	Set						1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000		
					1209.120901.16.038	Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman (guardrail)	Tersedianya Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Jumlah guadril yang terpasang	Buah	-	200	1.500.000.000									200	1.500.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.039	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	Tersedianya Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang terpasang	Buah	-	10	60.000.000									10	60.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.040	Pengadaan dan Pemasangan Pengaduh Pita Pengaduh	Tersedianya Pita Pengaduh	Jumlah pita pengaduh yang terpasang	m2	-	500	375.000.000									500	375.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.041	Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Tersedianya ZOSS	Jumlah Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yang terpasang	Lokasi	-	8	1.200.000.000										1.200.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
						Pengelolaan Terminal	Terminal	Jumlah Terminal	Unit						2	550.000.000	2	500.000.000	2	550.000.000	6	1.600.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					sub item	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal	Terpeliharaan Terminal	Jumlah unit yang dipelihara	Unit	-					2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	6	1.500.000.000		
					sub item	Evaluasi Penyelenggaraan Terminal Type C	Terselenggaranya Evaluasi Terminal Type C	Jumlah dokumen	Dokumen	-					1	50.000.000			1	50.000.000	2	100.000.000		
					sub item	Pembebasan Lahan Terminal							1										PERKIM	
					sub item	Pembangunan Terminal C									1								DTRB	
					1209.120901.16.043	FS. Pembangunan Terminal Penumpang Type C	Tersedianya FS. Terminal Type C	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					1209.120901.16.044	DED. Pembangunan Terminal Penumpang Type C	Tersedianya DED. Terminal Type C	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.045	Pemeliharaan Website Dinas Perhubungan	Terpeliharanya Website Profil Dinas Perhubungan	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	500.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.046	Penyusunan Profil Dinas Perhubungan	Tersedianya Profil Dinas Perhubungan	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000			1	100.000.000			1	100.000.000	3	300.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.047	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perhubungan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Perhubungan	Jumlah orang yang dikuseratkan dalam pelatihan	Orang	-	97	350.000.000	100	360.000.000	105	370.000.000	110	380.000.000	115	390.000.000	527	1.850.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
						Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedian Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Memenuhi Standar	Jumlah Kelengkapan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor Yang Memenuhi Standar	Jenis			7	5.520.000.000	6	25.470.000.000	6	15.760.000.000	6	26.510.000.000	7	74.860.000.000	KASIE TEKNIK SARANA		
					sub item	Pengadaan dan Pemasangan Alat PKB Beserta Kelengkapannya	Jumlah Unit Alat PKB dan Kelengkapannya yang Terpasang	Jumlah unit yang terpasang	Unit	11	2	600.000.000	1	600.000.000	22	20.000.000.000	11	10.000.000.000	22	20.000.000.000	58	51.200.000.000		
					sub item	Pengadaan Cetakan Khusus PKB	Tersedianya Cetakan Khusus PKB	Jumlah cetakan khusus PKB	Jenis	-	3	1.000.000.000	4	3.600.000.000	4	4.100.000.000	4	4.600.000.000	4	5.100.000.000	19	18.400.000.000	KASIE TEKNIK SARANA	
						1. Buku KIR			Buku		40.000	418.600.000	50.000	500.000.000	50.000	500.000.000	50.000	500.000.000	50.000	500.000.000				
						2. Plat Kir			Set		58.600	527.400.000	60.000	510.000.000	60.000	510.000.000	60.000	510.000.000	60.000	510.000.000				
						3. Stiker Tanda Samping Pengujian Kendaraan Bermotor			Lembar		6.000	54.000.000	10.000	90.000.000	10.000	90.000.000	10.000	90.000.000	10.000	90.000.000				
						4. Pengadaan Kartu Uji, Sertifikat Uji dan Stiker Barcode			Set				100.000	2.500.000.000	120.000	3.000.000.000	140.000	3.500.000.000	160.000	4.000.000.000				
					sub item	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah unit yang dipelihara	Unit	9			11	200.000.000	22	400.000.000	22	400.000.000	22	400.000.000	22	1.400.000.000	KASIE TEKNIK SARANA	
					sub item	Penyedhaan Perlengkapan Sarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana Prasarana PKB	Jumlah jenis sarana dan prasarana PKB	Jenis					6	750.000.000	6	500.000.000	6	750.000.000	18	2.000.000.000			
					sub item	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM PKB	Terpeliharanya SIM PKB	Jumlah SIM yang dipelihara	Sim				2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	8	800.000.000		
					sub item	Kalibrasi	Rekomendasi Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Yang di Kalibrasi	Unit	10			10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000	30	60.000.000	80	160.000.000		
					sub item	Pengadaan Mobil Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Mobil Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Mobil Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Unit				2	900.000.000							2	900.000.000		

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Prasarana Pengujian Kendaraan bermotor	Tersedianya Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Prasarana yang Terbangun	Unit				5	850.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	12	2.250.000.000		
					sub item	Pengadaan Gudang PKB	Terbangunya Gudang PKB	Jumlah Gedung Yang terbangun	Unit				1	200.000.000							1	200.000.000		
					sub item	Pengadaan Ruangan Verifikasi/Validasi Data	Tersedianya Ruangan Verifikasi/Validasi Data	Jumlah Runagan Ruangan Verifikasi/Validasi Data	Unit				1	150.000.000							1	150.000.000		
					sub item	Pengadaan Ruangan Pengambilan Kartu Uji, Sertifikat dan stiker	Tersedianya Ruangan Pengambilan Kartu Uji, Sertifikat dan stiker	Jumlah Ruangan Pengambilan Kartu Uji, Sertifikat dan stiker	Unit				1	150.000.000							1	150.000.000		
					sub item	Pengadaan Ruangan Tunggu dan Pelayanan Satu Atap	Tersedianya Ruangan Tunggu dan Pelayanan Satu Atap	Jumlah Ruangan Tunggu dan Pelayanan Satu Atap	Unit				1	150.000.000							1	150.000.000		
					sub item	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung PKB dan Lajur Uji	Terpeliharanya Gedung PKB dan Lajur Uji	Jumlah Gedung PKB dan Lajur Uji di pelihara	Unit				1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	8	1.600.000.000		
					1209.120901.16.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah unit yang dipelihara	Unit	9	9	150.000.000										150.000.000	KASIE TEKNIK SARANA	
					1209.120901.16.052	Pengadaan dan Pemasangan Patok Lalu Lintas (Delineator)	Tersedianya Patok Lalu Lintas (Delineator)	Jumlah Patok Lalu Lintas (Delineator) yang terpasang	Buah	-	500	350.000.000									500	350.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					1209.120901.16.053	Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	Meningkatnya Jumlah Angkutan yang Layak Jalan	Jumlah Unit angkutan yang di inspeksi layak jalan	Unit	30	40	100.000.000										100.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.054	Penyusunan Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersedianya Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	300.000.000					1	150.000.000			2	450.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.055	Penyusunan Masterplan Bidang Perhubungan	Tersedianya Penyusunan Masterplan Perhubungan	Jumlah dokumen	Dokumen		1	400.000.000									1	400.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.060	Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Terpilihnya Sopir/juru Mudi/Awak/Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah sopir angkutan yang ikut pemilihan	Orang		60	100.000.000										100.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
					1209.120901.16.063	Sosialisasi Rencana Penerapan Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan	Terselenggaranya Sosialisasi Rencana Penerapan Parkir di Tepi Jalan Umum Berlangganan	Jumlah orang yang ikut sosialisasi	Orang	-	60	100.000.000									60	100.000.000	KASIE PEMBINAAN KESELAMATAN	
					1209.120901.16.064	Penyediaan Sarana Prasarna Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana Prasarana PKB	Jumlah jenis sarana dan prasarana PKB	Jenis		4	500.000.000									4	500.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					1209.120901.16.065	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM PKB	Terpeliharanya SIM PKB	Jumlah SIM yang dipelihara	Sim		2	100.000.000									2	100.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
						Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	Terbangunnya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor		Gedung	-	1				1						2	-	DINAS TATA RUANG DAN BANGUNAN	
						Penyusunan Perencanaan Teknis Bidang Keselamatan Lalu Lintas	Tersusunya Dokumen Perencanaan Bidang Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	100.000.000	17	2.450.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	1	250.000.000	25	4.000.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
					sub item	- FS. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Tersedianya FS. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000		

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					sub item	- DED. Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Tersedianya DED Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah dokumen	Dokumen				1	100.000.000							1	100.000.000		
					sub item	- FS Pembangunan JPO	Tersedianya Dokumen Pembangunan JPO	Jumlah Dokumen	Dokumen				1	150.000.000							1	150.000.000		
					sub item	- DED Pembangunan Perlengkpaan Jalan di Perlintasan Kereta Api	Tersusunya Dokumen DED Pembangunan Perlengkpaan Jalan di Perlintasan Kereta Api	Dokumen	Dokumen				1	100.000.000							1	100.000.000		
					sub item	- DED Pengembangan Gedung PKB	Tersusunya Dokumen DED Pengembangan Gedung PKB	Jumlah Dokumen	Dokumen				1	100.000.000							1	100.000.000		
					sub item	- DED Pembangunan JPO	Tersedianya Dokumen Pembangunan JPO	Jumlah Dokumen	Dokumen						2	500.000.000	2	500.000.000	1	250.000.000	5	1.250.000.000		
					sub item	- DED Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Pelayanan Kepelabuhanan	Tersedianya Dokumen Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Pelayanan Kepelabuhanan	Jumlah Dokumen	Dokumen				1	200.000.000							1	200.000.000		
					sub item	Fs. Pembangunan Fasilitas Jalur Sepeda	Tersusunya Dokumen Fs. Pembangunan Fasilitas Jalur Sepeda	Dokumen	Dokumen						1	100.000.000					1	100.000.000		
					sub item	DED Pembangunan Fasilitas Jalur Sepeda	Tersusunya Dokumen DED. Fasilitas Jalur Sepeda	Dokumen	Dokumen								1	100.000.000			1	100.000.000		
					sub item	Perencanaan Penataan Perlintasan Sebidang	Tersusunya Perencanaan Untuk Penataan Keselamatan Pada Perlintasan Sebidang	Jumlah Lokasi	Lokasi				12	1.800.000.000							12	1.800.000.000		

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD			
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Pembangunan Fasilitas Untuk Kendaraan Tidak Bermotor (Fasilitas Pejalan Kaki dan Bersepeda)	Terbangunan Fasilitas Untuk Kendaraan Tidak Bermotor	Jumlah	Lokasi										1	1.500.000.000	1	1.500.000.000	KASIE TEKNIK PRASARANA	
						Pembangunan Fasilitas Jalur Sepeda	Terbangunan Fasilitas Jalur Sepeda	Lokasi	Lokasi										1	1.500.000.000	1	1.500.000.000		
					1209.18	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	Presentase Ketersediaan PJU	Jumlah PJU yang terpasang dibagi kebutuhan PJU		Persen	10%	37.450.000.000	10%	31.150.000.000	10%	29.800.000.000	10%	31.120.000.000	10%	37.100.000.000	10%	166.620.000.000	BIDANG PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	DISHUB Kabupaten Tangerang
					1209.120901.18.001	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terbangunnya Titik Penerangan Jalan Umum	Jumlah titik yang terpasang	Titik	1000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	100	2.500.000.000	500	12.500.000.000	KASIE PEMBANGUNAN PJU	
					1209.120901.18.002	Pemeliharaan PJU	Terpeliharanya PJU	Jumlah IDPEL yang dipelihara	IDPEL	-	513	3.000.000.000	513	3.000.000.000	513	3.000.000.000	513	3.000.000.000	513	3.000.000.000	2.565	15.000.000.000	KASIE PEMELIHARAAN PJU	
					1209.120901.18.003	Rehabilitasi PJU	Terpeliharanya Rehabilitasi PJU	Jumlah IDPEL yang di rehab	IDPEL/PANEL	-	10	350.000.000	10	350.000.000	10	400.000.000	10	400.000.000	10	500.000.000	50	2.000.000.000	KASIE PEMELIHARAAN PJU	
					1209.120901.18.004	Meterisasi PJU	Tersedianya Meterisasi PJU	Jumlah IDPEL yang di meterisasi	IDPEL	-	20	500.000.000	10	400.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	45	1.200.000.000	KASIE SARANA DAN PRASARANA PJU	
					1209.120901.18.005	Identifikasi dan Inventarisasi PJU	Tersedianya Data Identifikasi dan Inventirasi PJU	Jumlah dokumen	Dokumen	-			1	100.000.000			1	120.000.000			2	220.000.000	KASIE PEMBANGUNAN PJU	
					1209.120901.18.006	Pembiayaan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Terpenuhinya Pembiayaan Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah IDPEL yang dibayar	Bulan	-	12	29.000.000.000	12	22.800.000.000	12	22.800.000.000	12	24.000.000.000	12	30.000.000.000	60	128.600.000.000	KASIE SARANA DAN PRASARANA PJU	
					1209.120901.18.007	Pengadaan Mobil Skylift	Tersedianya Mobil Skylift	Jumlah unit mobil skylift	Unit	1	3	2.000.000.000	2	2.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	8	7.000.000.000	KASIE SARANA DAN PRASARANA PJU	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Penyusunan Perencanaan Teknis Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tersusnya Dokumen Perencanaan Bidang Penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	100.000.000									1	100.000.000	KASIE SARANA DAN PRASARANA PJU	
						- Fs. Smart Light	Tersusnya Dokumen Fs. Smart Light	Jumlah Dokumen			1										1	-		
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Prosentase Penyelesaian Penanganan Titik Kemacetan						-	11%		28%		50%		78%		100%		100%	-		
					1209.17	PROGRAM PELAYANAN ANGKUTAN UMUM (SITRAM)	Tersedianya Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	Jumlah trayek dan Moda yang di butuhkan	Jaringan	19	1	1.550.000.000	1	1.950.000.000	1	2.450.000.000	2	3.250.000.000	2	3.700.000.000	7	12.900.000.000	BIDANG ANGKUTAN	DISHUB Kabupaten Tangerang
					1209.120901.17.002	Survey Kinerja Jaringan Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Tersedianya Data Jaringan Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	150.000.000			1	150.000.000			1	150.000.000	3	450.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.003	Kajian Kebutuhan Jaringan Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Tersedianya Data Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-			1	100.000.000			1	100.000.000			2	200.000.000	KASIE JARINGAN TRANSFORTASI	
					1209.120901.17.004	Kajian Kebutuhan Trans Jabodetabek	Tersedianya Kajian Kebutuhan TransJabodetabek	Jumlah dokumen	Dokumen	-							1	100.000.000			1	100.000.000	KASIE JARINGAN TRANSFORTASI	
					1209.120901.17.009	Kajian Kebutuhan Angkutan Pengumpul (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek	Tersedianya Kajian Angkutam Pengumpul (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek	Jumlah dokumen	Dokumen	-							1	200.000.000			1	200.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.010	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perhubungan	Terintegrasinya Sistem Antar Bidang	Jumlah Sistem yang dipelihara dan di kembangkan	Sistem	-	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	2.000.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.011	Angkutan Mudik Gratis	Meningkatnya pemudik yang tidak menggunakan Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan	195	195	500.000.000	390	1.000.000.000	780	1.500.000.000	1560	2.000.000.000	3120	2.500.000.000	6045	7.500.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Penyusunan Perencanaan Teknis Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen	Dokumen		1	100.000.000									1	100.000.000	KASIE SARANA DAN PRASARANA PJU	
						- Fs. Smart Light	Tersusunnya Dokumen Fs. Smart Light	Jumlah Dokumen			1										1	-		
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Prosentase Penyelesaian Penanganan Titik Kemacetan						-	11%		28%		50%		78%		100%		100%	-		
					1209.17	PROGRAM PELAYANAN ANGKUTAN UMUM (SITRAM)	Tersedianya Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	Jumlah trayek dan Moda yang dibutuhkan	Jaringan	19	1	1.550.000.000	1	1.950.000.000	1	2.450.000.000	2	3.250.000.000	2	3.700.000.000	7	12.900.000.000	BIDANG ANGKUTAN	DISHUB Kabupaten Tangerang
					1209.120901.17.002	Survey Kinerja Jaringan Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Tersedianya Data Jaringan Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	150.000.000			1	150.000.000			1	150.000.000	3	450.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.003	Kajian Kebutuhan Jaringan Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Tersedianya Data Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-			1	100.000.000			1	100.000.000			2	200.000.000	KASIE JARINGAN TRANSFORTASI	
					1209.120901.17.004	Kajian Kebutuhan Trans Jabodetabek	Tersedianya Kajian Kebutuhan TransJabodetabek	Jumlah dokumen	Dokumen	-							1	100.000.000			1	100.000.000	KASIE JARINGAN TRANSFORTASI	
					1209.120901.17.009	Kajian Kebutuhan Angkutan Pengumpan (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek	Tersedianya Kajian Angkutam Pengumpul (Feeder) yang Melayani Transjabodetabek	Jumlah dokumen	Dokumen	-							1	200.000.000			1	200.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.010	Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Perhubungan	Terintegrasinya Sistem Antar Bidang	Jumlah Sistem yang dipelihara dan di kembangkan	Sistem	-	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	2.000.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.011	Angkutan Mudik Gratis	Meningkatnya pemudik yang tidak menggunakan Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan Roda 2	Jumlah Kendaraan	195	195	500.000.000	390	1.000.000.000	780	1.500.000.000	1560	2.000.000.000	3120	2.500.000.000	6045	7.500.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					12091.20901.17.015	Survey Kinerja Jaringan Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Tersedianya Data Jaringan Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000			1	100.000.000			1	100.000.000	3	300.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.016	Kajian Kebutuhan Jaringan Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Tersedianya Data Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	200.000.000									1	200.000.000	KASIE JARINGAN TRANSFORTASI	
					12091.20901.17.017	Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Tersedianya Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-									1	150.000.000	1	150.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					12091.20901.17.018	Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Tersedianya Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan Dalam Trayek	Jumlah dokumen	Dokumen	-							1	150.000.000			1	150.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
					1209.120901.17.019	Pembinaan Teknis Penyedia Angkutan Orang	Meningkatnya Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang	Jumlah Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang	Jumlah	1.750	2013	100.000.000	2415	100.000.000	3.019	150.000.000	3.924	250.000.000	5.298	250.000.000	16.669	850.000.000	KASIE ANGKUTAN ORANG DAN MULTIMODA	
							Terselenggaranya Pembinaan Teknis Angkutan Orang	Jumlah oarangikutsertakan dalam bimtek	Orang	-	75	50.000.000	75	50.000.000			75	50.000.000			225	150.000.000		
							Meningkatnya Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang	Jumlah Kepatuhan Pengurusan Perijinan Angkutan Orang	Persen	1.750	2013	50.000.000	2415	50.000.000	3.019	150.000.000	3.924	150.000.000	5.298	200.000.000	16.669	600.000.000		
					1209.120901.17.020	Pembinaan Teknis Penyedia Angkutan Barang	Terselenggaranya Pembinaan Teknis Angkutan Barang	Jumlah oarangikutsertakan dalam bimtek	Orang	-	75	100.000.000			75	100.000.000			75	100.000.000	225	300.000.000	KASIE ANGKUTAN BARANG	
						Penyusunan Perencanaan Teknis Bidang Angkutan	Tersusunya Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Angkutan	Jumlah Dokumen	Dokumen		-	-	2	350.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	2	50.000.000	6	500.000.000	KASIE JARINGAN TRANSFORTASI	
					sub item	;-FS. LRT di Kabupaten Tangerang	Tersedianya FS. LRT di Kabupaten Tangerang	Jumlah dokumen	Dokumen	-			1	300.000.000					1		2	300.000.000	KASIE JARINGAN TRANSFORTASI	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					sub item	Pendataan Angkutan Barang di Perusahaan	Tersedianya Data Angkutan di Perusahaan	Jumlah Data Angkutan Barang di Perusahaan	Dokumen			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000			
					1209.15	PROGRAM MANAJEMEN LALU LINTAS	Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	Jumlah titik penanganan kemacetan	Titik	18	2	15.896.000.000	3	11.614.000.000	4	24.886.000.000	4	22.004.000.000	5	25.456.000.000	18	99.856.000.000	BIDANG LALU LINTAS	DISHUB Kabupaten Tangerang
					1209.120901.15.012	FS.Pembaangunan ATCS Perhubungan	Tersedianya FS.Pembaangunan ATCS Perhubungan	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000								1	100.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN		
					1209.120901.15.013	DED. Pembangunan ATCS Perhubugan	Tersedianya DED. Pembangunan ATCS Perhubungan	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000								1	100.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN		
					1209.120901.15.014	Pembangunan Area Traffic Control Sistem (ATCS) Perhubungan	Terbangunnya ATCS Perhubungan	Jumlah titik terbangun ATCS	Titik					6	9.000.000.000	6	9.000.000.000	6	9.000.000.000	18	27.000.000.000	KASIE REKAYASA LALIN		
					1209.1209.01.15.016	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	Tersedianya Rambu Lalu Lintas	Jumlah unit yang terpasang	Jenis		3	1.290.000.000	3	1.115.000.000	3	1.115.000.000	3	1.115.000.000	3	1.115.000.000	3	5.750.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					1. Rambu Standar				Unit		300	540.000.000	300	540.000.000	300	540.000.000	300	540.000.000	300	540.000.000	1.500	2.700.000.000		
					2. RPPJ				Unit		15	270.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	55	1.070.000.000		
					3. Rambu Tiang F				Unit		60	480.000.000	50	375.000.000	50	375.000.000	50	375.000.000	50	375.000.000	260	1.980.000.000		
					1209.120901.15.017	Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan	Tersedianya Marka Jalan	Jumlah meter marka yang terpasang	m2			800.000.000		560.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		1.800.000.000		6.760.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					1. Marka Jalan (Jalur,Lajur,Membujur,Melintang,Serong,Lambang,Kotak Kuning,Pulau Lalu Lintas)				m2		3.000		2.000		6.000		6.000		6.000		23.000			

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					1209.120901.15.018	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Tersedianya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Jumlah unit yang terpasang	Jenis		2	1.430.000.000	2	1.430.000.000	2	1.430.000.000	2	1.430.000.000	2	1.430.000.000	2	7.150.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					..	1. Pengadaan dan Pemasangan APILL (Traffic Light)			Unit		4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	20	5.000.000.000		
						2. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)			Unit		10	430.000.000	10	430.000.000	10	430.000.000	10	430.000.000	10	430.000.000	50	2.150.000.000		
					1209.120901.15.023	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan	Tersedianya Paku Jalan	Jumlah buah paku jalan yang terpasang	Buah		600	200.000.000	600	200.000.000	600	200.000.000	600	200.000.000	600	200.000.000	3.000	1.000.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					1209.120901.15.026	Pengadaan Mobil Derek	Tersedianya Mobil Derek	Jumlah unit mobil derek	Unit	-	1	1.260.000.000									1	1.260.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.028	Pengadaan Kendaraan Perhubungan	Tersedianya Kendaraan Perhubungan	Jumlah unit kendaraan perhubungan	Unit		26	2.950.000.000	3	1.000.000.000	4	3.050.000.000	0	-	4	3.050.000.000	38	10.050.000.000	KASIE WASDAL	
						1. Pengadaan Mobil Operasional Pengawasan dan Pengendalian			Unit		2	600.000.000	1	300.000.000							3	900.000.000		
						2. Pengadaan Mobil Patwal			Unit		1	600.000.000			1	600.000.000			1	600.000.000	3	1.800.000.000		
						3.Pengadaan Motor Operasional Pengaturan Lalu Lintas			Unit		20	800.000.000	2	700.000.000							22	1.500.000.000		
						4. Pengadaan Kendaraan Pengangkut Perlengkapan Jalan			Unit		1	350.000.000			1	350.000.000			1	350.000.000	3	1.050.000.000		
						5. Pengadaan Mobil Dalhub			Unit		2	600.000.000			1	600.000.000			1	600.000.000	4	1.800.000.000		

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						6. Pengadaan Mobil Derek	Tersedianya Mobil Derek	Jumlah unit mobil derek	Unit	-	1				1	1.500.000.000			1	1.500.000.000	3	3.000.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.029	Pengadaan dan Pemasangan CCTV	Tersedianya CCTV	Jumlah titik cctv yang terpasang	Titik	-	20	300.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	60	1.100.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					1209.120901.15.034	Kegiatan Pendataan Sarana Perlengkapan Jalan	Tersedianya Data Kebutuhan Perlengkapan Jalan	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	1	67.000.000			1	67.000.000			1	67.000.000	3	201.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
						Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terpeliharanya Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Terpelihara	Jumlah				9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	41	1.500.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					sub item	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	Terpeliharanya Rambu-Rambu Lalu Lintas	Jumlah unit rambu-rambu lalu lintas yang dipelihara	Unit		8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	8	100.000.000	40	500.000.000		
					sub item	Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Terpeliharanya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas	Jumlah simpang apili yang dipelihara	Unit		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	1.000.000.000		
					1209.120901.15.044	Pemeliharaan Area Traffic Control System (ATCS) Perhubungan	Terpeliharanya ATCS Perhubungan	Jumlah terpelihara	Titik								6	500.000.000	6	500.000.000	12	1.000.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					1209.120901.15.045	FS. Manajemen Lalu Lintas Satu Arah	Tersedianya FS. Manejemen Lalu Lintas Satu Arah	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	200.000.000									1	200.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
					1209.120901.15.047	FS. Design Geometrik Simpang	Tersedianya Kajian Geometrik Simpang	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	400.000.000									1	400.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
					1209.120901.15.048	Andalalin Antar Kawasan	Terlaksananya Andalalin Antar Kawasan	Jumlah Dokumen	Dokumen	-			1	200.000.000					1	250.000.000	2	450.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					1209.120901.15.049	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tersedianya rekomendasi kebijakan	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan	Rekomenda si	-	4	480.000.000	4	480.000.000	4	480.000.000	4	480.000.000	4	480.000.000	20	2.400.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	

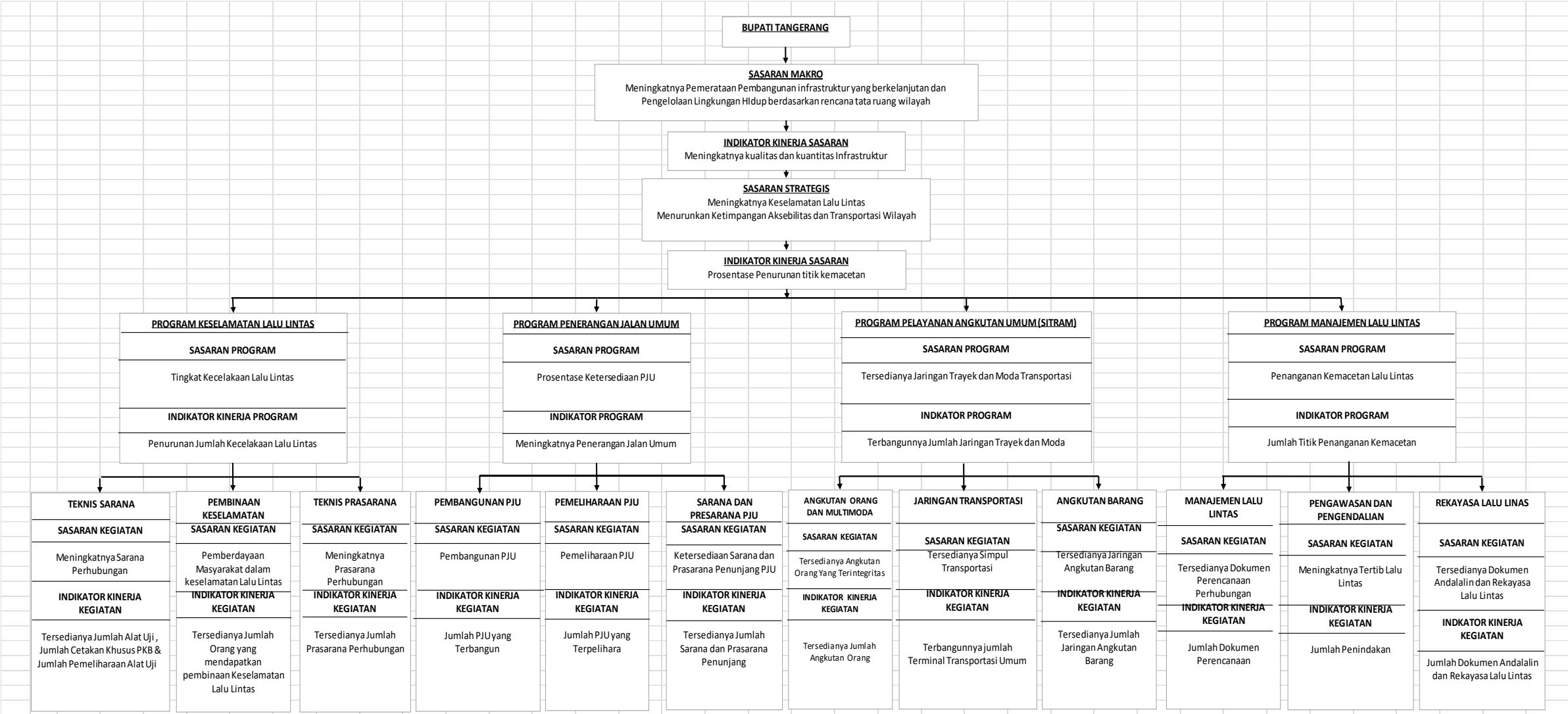
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					1209.120901.15.051	Wahana Tata Nugraha	Terselenggaranya Wahana Tata Nugraha	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000										100.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
					1209.120901.15.052	Pengadaan Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (Parkir Khusus)			Jenis		-	-			2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	6	2.100.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
						1. Rambu Standar Parkir	Tersedianya Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (Of Street Parking)	Jumlah unit yang terpasang	Unit	-					250	450.000.000	250	450.000.000	250	450.000.000	750	1.350.000.000		
						2. Marka Parkir			m2	-					800	250.000.000	800	250.000.000	800	250.000.000	2.400	750.000.000		
					1209.120901.15.054	Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (CAR FREE DAY)	Terselenggaranya Hari Bebas Kendaraan Bermotor	Jumlah hari car free day	Hari	-	52	430.000.000	52	430.000.000	52	430.000.000	52	430.000.000	53	450.000.000	261	2.170.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.055	Operasi Penegakan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Titik Lokasi Penegakan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah titik Penegakan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Titik		1	550.000.000	1	550.000.000	1	550.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	5	2.350.000.000	KASIE WASDAL	
					sub item	Penegakan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Titik Lokasi Penegakan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah titik Penegakan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Titik	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	5	750.000.000		
					sub item	Pembangunan POS Pantau Lalu Lintas	Terbangunnya Pos Pantau Lalu Lintas	Jumlah pos yang terbangun	Unit	-	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	10	1.000.000.000		
					sub item	Pengadaan Alat Komunikasi Handy Talkie (HT)	Tersedianya Alat Komunikasi	Jumlah unit HT	Unit	-	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000					150	600.000.000		

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					1209.120901.15.056	Operasi Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Titik Lokasi Operasi Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Jumlah titik lokasi	Titik	10	10	699.000.000	10	699.000.000	10	699.000.000	10	699.000.000	10	699.000.000	50	3.495.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.057	Operasi Kawasan Tertib Lalu Lintas	Tindakan Operasi Kawasan Tertib Lalu Lintas	Jumlah penindakan	Jumlah	180	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	250	150.000.000	1.250	750.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.058	Pengamanan Jalur Lintasan Acara Protokol Pejabat Daerah	Pengawasan Protokol	Jumlah Pengawasan Protokol	Jumlah	20	20	150.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	100	950.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.059	Operasi Penertiban dan Penindakan Angkutan Orang dalam Trayek, Angkutan Orang tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang	Jumlah Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Orang dalam Trayek, Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang	Jumlah Penindakan	Jumlah	0	2160	1.600.000.000	2040	1.600.000.000	1920	1.600.000.000	1800	1.600.000.000	1680	1.600.000.000	9.600	8.000.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.060	Operasi Penertiban Parkir Liar	Titik Operasi Tindakan Parkir Liar	Jumlah titik parkir liar	Titik	30	20	200.000.000									20	200.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.061	Operasi Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan - kegiatan Daerah	Titik Lokasi Operasi Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan - kegiatan Daerah	Jumlah Pengamanan Lalu Lintas Kegiatan - kegiatan Daerah	Jumlah	7	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	7	200.000.000	35	1.000.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.062	Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Jumlah dokumen	Dokumen	-	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	60	1.000.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
					1209.120901.15.066	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kawasan Manajemen Lalu Lintas Sistem Satu Arah	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kawasan Manajemen Lalu Lintas Sistem Satu Arah	Jumlah lokasi terpasang di Kawasan Manajemen Lalu Lintas Sistem Satu Arah	Lokasi	-			1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	4	800.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluara n (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					1209.120901.15.067	Pengadaan Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas			Jenis		4	465.000.000		-	4	465.000.000	-	-	4	465.000.000	4	1.395.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
						1. Traffic Cone	Tersedianya Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas	Jumlah buah pengadaan Sarana Pendukung Keselamatan Lalu Lintas	Buah		200	270.000.000			200	270.000.000			200	270.000.000	600	810.000.000		
						2. Barrier			Buah		100	160.000.000			100	160.000.000			100	160.000.000	300	480.000.000		
						3. Stick Lamp			Buah		100	25.000.000			100	25.000.000			100	25.000.000	300	75.000.000		
						4. Walking Measure			Buah		5	10.000.000			5	10.000.000			5	10.000.000	15	30.000.000		
					1209.120901.15.068	Pengadaan Perlengkapan Jukir	Tersedianya Perlengkapan Jukir	Jumlah jukir yang di fasilitasi	Orang	108	108	75.000.000									108	75.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.069	FS. Optimalisasi Simpang Apill	Tersedianya FS. APILL di Persimpangan	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
					1209.120901.15.070	DED. Optimalisasi Simpang Apill	Tersedianya DED. APILL di Persimpangan	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
					1209.120901.15.071	Pembinaan DISHUB Cilik (DISCIL)	Terselenggaranya Pembinaan DISHUB Cilik (DISCIL)	Jumlah orang yang ikut sertakan dalam pembinaan	Orang	-	50	100.000.000									50	100.000.000	KASIE WASDAL	
					1209.120901.15.074	Operasi Penertiban Juru Parkir Liar	Titik Operasi Penindakan Jukir Liar	Jumlah titik jukir	Titik	-	10	100.000.000										100.000.000	KASIE WASDAL	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
						Pengelolaan Perparkiran	Titik Parkir	Jumlah Titik Parkir	Titik				20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	20	400.000.000	80	1.600.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	
					sub item	Operasi Penertiban Parkir Liar	Titik Operasi Tindakan Parkir Liar	Jumlah titik parkir liar	Titik	30			20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	20	200.000.000	80	800.000.000		
					sub item	Pengadaan Perlengkapan Jukir	Tersedianya Perlengkapan Jukir	Jumlah jukir yang di fasilitasi	Orang	108			108	100.000.000	108	100.000.000	108	100.000.000	108	100.000.000	432	400.000.000		
					sub item	Operasi Penertiban Juru Parkir Liar	Titik Operasi Penindakan Jukir Liar	Jumlah titik jukir Liar	Titik	-			10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	40	400.000.000		
					1209.120901.15.075	Pengadaan Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum (On Street)	Tersedianya Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (On Street Parking)	Jumlah unit yang terpasang	Jenis		2	400.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	700.000.000	2	3.200.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
						1. Rambu Standar Parkir			Unit		100	200.000.000	250	450.000.000	250	450.000.000	250	450.000.000	250	450.000.000	1.100	2.000.000.000		
						2. Marka Parkir			m2		500	200.000.000	800	250.000.000	800	250.000.000	800	250.000.000	800	250.000.000	3.700	1.200.000.000		
						Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Terbangunnya Halte	Jumlah halte yang terbangun	Unit			-		-		750.000.000		1.150.000.000		750.000.000		2.650.000.000	KASIE REKAYASA LALIN	
					sub item	Pembangunan Halte	Terbangunnya Halte	Jumlah halte yang terbangun	Unit					5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	15	2.250.000.000			
					sub item	Pemeliharaan Halte	Terpeliharanya Halte	Jumlah Unit halte yang dipelihara	Unit						5	400.000.000			5	400.000.000				
						Penyusunan Perencanaan Teknis Bidang Lalu Lintas	Tersusnya Dokumen Perencanaan Lalu Lintas	Jumlah Dokumen	Dokumen		4	400.000.000	5	800.000.000	0	-	0	-	0	-	9	1.200.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Capaian Program/Hasil (Outcome) dan Kegiatan/Keluaran (Output)	Definisi Operasional / Rumusan	Satuan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
											Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	
											2019		2020		2021		2022		2023					
											Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)			Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
					sub item	- FS Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (Parkir Khusus)	Tersedianya FS. Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (Parkir Khusus)	Jumlah Dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000		
					sub item	- FS. Frontage Toll (Jalan Seजार Tol)	Tersedianya FS. Frontage Toll (Jalan Seजार Tol)	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000									1	100.000.000		
					sub item	- FS. Promenade Road (Jalan Seजार Sungai)	Tersedianya FS. Promenade Road (Jalan Seजार Sungai)	Jumlah dokumen	Dokumen	-	1	100.000.000	1								2	100.000.000		
					sub item	- FS. Park n Ride	Tersedianya FS. Park n Ride	Jumlah dokumen	Dokumen		1	100.000.000									1	100.000.000		
					sub item	- FS. Pembangunan Halte	Tersusunnya Dokumen FS Pembangunan Halte	Dokumen	Dokumen				1	100.000.000							1	100.000.000		
					sub item	- DED Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (Parkir Khusus)	Tersedianya DED Pembangunan Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (Parkir Khusus)	Jumlah Dokumen	Dokumen				1	100.000.000							1	100.000.000		
					sub item	- DED Pembangunan Halte	Tersusunnya Dokumen DED Pembangunan Halte	Dokumen	Dokumen				1	100.000.000							1	100.000.000		
					sub item	DED Design Geometrik Simpang	Tersedianya DED. Penyusunan Kajian Geometrik Simpang	Jumlah dokumen	Dokumen	-			1	500.000.000							1	500.000.000	KASIE MANAJEMEN LALIN	



BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 adalah sebagaimana tersusun dalam table 7.1 Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Sedangkan indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tertuang dalam table 7.1

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mangacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Dan Tujuan Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi Wilayah	Presentase Penyelesaian Penanganan Titik Kemacetan	-	-	11%	28%	50%	78%	100%	100%

INDIKATOR YANG BERKAITAN DENGAN KESEKRETARIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANGERANG

No	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Dan Tujuan Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang	57,29 (Angka)	64,95 (Angka)	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	74,00

Tabel 7.2

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2023

Kode						Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Definisi Operasional / Rumusan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											Tahun Ke-1		Tahun Ke-2		Tahun Ke-3		Tahun Ke-4		Tahun Ke-5				
											2019		2020		2021		2022		2023				
1	2	2	4		6	7	8			9	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	RP	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	22
1	2	09	12	01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	Rata-rata pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran		100,00	12.501.080.000	100,00	12.592.560.000	100,00	12.642.560.000	100,00	12.692.560.000	100,00	12.742.560.000	100%	63.171.320.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Persen	Rata-rata pemenuhan sarana prasarana aparatur		100,00	4.100.960.000	100,00	4.711.920.000	100,00	4.926.920.000	100,00	5.146.920.000	100,00	5.456.920.000	100%	24.343.640.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Presentase pemenuhan aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin	Persen	Jumlah aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin dibagi jumlah aparatur perangkat daerah		100,00	518.000.000	100,00	310.000.000	100,00	645.000.000	100,00	337.500.000	100,00	670.000.000	100%	2.480.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Presentase Pemenuhaan kapasitas sumber daya aparatur	Persen	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek di bagi jumlah aparatur		0,20	700.000.000	0,20	750.000.000	0,20	775.000.000	0,20	800.000.000	0,20	825.000.000	100%	3.850.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Presentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen	Jumlah dokumen pelaporan yang di susun di bagi jumlah dokumen pelaporan yang wajib di penuhi		100,00	54.000.000	100,00	54.000.000	100,00	54.000.000	100,00	54.000.000	100,00	54.000.000	100%	270.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	07	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan	Persen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipenuhi		100,00	395.000.000	100,00	395.000.000	100,00	395.000.000	100,00	395.000.000	100,00	445.000.000	100%	2.025.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	15	PROGRAM KESELAMATAN LALU LINTAS	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	angka	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	435 (Angka)	413 (Angka)	8.285.000.000	392 (Angka)	16.780.000.000	372 (Angka)	37.065.000.000	353 (Angka)	26.165.000.000	335 (Angka)	38.175.000.000	335 (Angka)	126.470.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	16	PROGRAM PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	Presentase Ketersediaan PJU	Persen	Jumlah PJU yang terpasang dibagi kebutuhan PJU		10%	37.450.000.000	10%	31.150.000.000	10%	29.800.000.000	10%	31.120.000.000	10%	37.100.000.000	10%	166.620.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	17	PROGRAM PELAYANAN ANGKUTAN UMUM (SITRAM)	Tersedianya Jaringan Trayek dan Moda Transportasi	Jaringan	Jumlah trayek dan Moda yang di butuhkan	19 Jaringan	1 Jaringan	1.550.000.000	1 Jaringan	1.950.000.000	1 Jaringan	2.450.000.000	2 Jaringan	3.250.000.000	2 Jaringan	3.700.000.000	7 Jaringan	12.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
1	2	09	12	01	18	PROGRAM MANAJEMEN LALU LINTAS	Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	Titik	Jumlah titik penanganan kemacetan	18 Titik	2 Titik	15.896.000.000	3 Titik	11.614.000.000	4 Titik	24.886.000.000	4 Titik	22.004.000.000	5 Titik	25.456.000.000	18 Titik	99.856.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 5 (lima) tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Tangerang 5 Tahun 2019-2023 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang 5 (lima) tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kabupaten Tangerang. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing

Rencana strategis ini diharap mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kabupaten Tangerang Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat, dan Sejahtera”. Segera terwujud.